POLA KERJA KETUA PKK DALAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DI KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RISNA MAULIDA
NIM. 160403012
Mahasiswa Manajemen Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIJKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Diajukan Oleh:

RISNA MAULIDA

NIM. 160403012

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dalwah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Mahmuddin, M.Si.	**Sakdiah, S.Ag, M.A,g.**
19721020 199703 1 002	**19730713 200801 2 007**

Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmú Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajmen Dakwah

Diajukan Oleh:

RISNA MAULIDA
NIM. 160403012

Pada Hari/Tanggal:
17 Desember 2021 M

Di
Darussalam-Banda Aceh
Dewan Penguji,

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Mahmuddin, M.Si.	**Sakdiah, S.Ag, M.A,g.**
NIP. 197210201997031002	**NIP. 197307132008012007**
Penguji I,	**Penguji II,**
Raihan, S.Sos.I., MA	**Kamaruddin, S.Ag., MA**
NIP. 198111072006042003	**NIP. 196904141998031002**

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya : Risna Maulida
NIM : 160403012
Jenjang : Strata satu
Jurusan/prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 3 Desember 2021
Penulis,

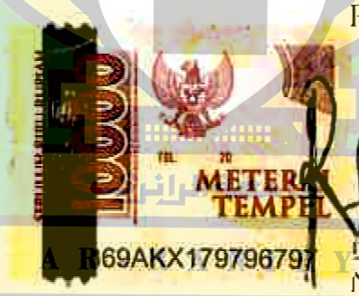

Risna Maulida
NIM.160403012

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pelaksanaan program PKK yang dilakukan oleh ketua PKK di setiap gampong yang ada di kecamatan Lhoksukon, banyak program PKK yang belum terlaksana sesuai dengan target karena kurangnya kemampuan dari ketua PKK dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini berjudul "Pola Kerja Ketua PKK dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara". penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ketua PKK dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program PKK serta untuk mengetahui peluang dan tantangan yang terdapat dalam pelaksanaan program PKK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Kecamatan Lhoksukon serta yang menjadi sampel adalah gampong Matang teungoh, kota Lhoksukon dan gampong Asan LB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua ketua PKK yang ada di kecamatan Lhoksukon dapat mewujudkan pelaksanaan prorgam PKK dengan baik, masih ada ketua PKK di sebagian wilayah Kecamatan Lhoksukon yang belum bisa membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja ketua PKK, dan terdapatnya pertikaian yang terjadi antar kader PKK sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program PKK. Peluang dalam pelaksanaan PKK adalah adanya tempat untuk pelaksanaan PKK, dukungan dari para aparat gampong dan antusias masyarakat dalam mengikuti program PKK dan hambatan dalam pelaksanaan PKK adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program PKK, kurangnya tenaga kerja kader PKK yang menguasai bidangnya, serta kurangnya anggaran dan pelaksanaan program PKK.

Kata Kunci: Pola kerja, PKK, Keluarga Sejahtera

AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala qudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner alam yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jurusan Manajemen Dakwah, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Untuk itu penulis memilih judul **" Pola Kerja Ketua PKK dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Kabupaten Aceh Utara"**. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si. sebagai ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD), serta sebagai penasehat Akademik dan kepada semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si. sebagai pembimbing pertama dan Ibu Sakdiah, S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
4. Orang tua tercinta, ayahanda Tarmizi dan ibunda Sanuati yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan putrinya tak henti-hentinya, serta kepada Abang tercinta Muhammad Wahyudi dan Adik tercinta Naila Fitria, Suci Qadarsih yang terus memberikan dorongan agar tidak pernah berhenti untuk meraih harapan keluarga.
5. Kepada sahabat-sahabat tercinta Saumi Rahmadayani, Zahara Sausan, Risa Rahmawati, Muhani, dan Yosi Amona yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini

serta kepada seluruh teman-teman program studi Manajemen Dakwah angkatan 2016 yang telah membantu semangat dan arahannya.

6. Kepada teman-teman kos saya Naila Fitria, Chairin Sakinah dan Liza Fazira yang selalu menemami peneliti dan membantu menghibur peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Ketua PKK, kade PKK dan masyarakat gampong Matang teungoh, kota Lhoksukon, dan gampong Asan LB yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis kiranya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya.

Banda Aceh, 2 Desember 2021

Penulis,

Risna Maulida

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6

BAB II: KAJIAN PUSTAKA
A. Pola Kerja 14
B. Kepemimpinan 17
C. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 16
D. Pembinaan 24
E. Keluarga Sejahtera 25
F. Penelitian Terdahulu 33
G. Kerangka Pemikiran 36

BAB III: METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 44
B. Lokasi Penelitian 45
C. Sumber Data 45
D. Teknik Pengumpulan Data 46
E. Subjek Penelitian 48
F. Teknik Analisis Data 49

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Lhoksuon Kabupaten Aceh Utara 51
B. Gambaran Umum pkk lhoksuon Kabupaten Aceh Utara 55
C. Pola kerja ketua PKK dalam melakukan pembinaan keluarga sejahtera 61
D. Peluang dan hambatan PKK dalam meningkatkan pembinaan keluarga sejahtera 75

BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti 41
Tabel 4.1 : Jumlah fasilitas dan sarana pertanian yang terdapat di Kecamatan Lhoksukon 46
Tabel 4.2 : Jumlah banguan dan prasarana di kecamatan Lhoksukon 47
Tabel 4.3 : Jumlah sarana pelayanan kesehatan utama di kecamatan Lhoksukon 47
Tabel 4.4 : Jumlah kendaraan angkutan umum dan jenisnya di kecamatan Lhoksukon 48
Tabel 4.5 : Ringkasan kesimpulan penelitian 82

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka berfikir 43
Gambar 4.1 : Struktur TP-PKK gampong Matang teungoh 58
Gambar 4.2 : Struktur TP-PKK kota Lhoksukon 59
Gambar 4.3 : Struktur TP-PKK gamong Asan LB 60

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Lampiran II : Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Lampiran III : Pedoman Wawancara
Lampiran IV : Daftar Informan
Lampiran V : Daftar Gambar Wawancara
Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Lhoksukon merupakan ibukota dari Kabupaten Aceh Utara, dengan luas kecamatan 243 KM 3 = 24.300 Ha, yang terdiri dari 4 kemukiman dan 75 Desa. Dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 51974 jiwa, dengan jenis kelamin 25797 laki-laki dan jenis kelamin 26177 perempuan.[1] Kecamatan Lhoksukon merupakan salah satu Kecamatan yang menjalankan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan tujuan dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kreativitas perempuan dan dapat membantu Gampong dalam memecahkan permasalahan kemiskinan sehingga terbentuknya keluarga sejahtera.

Dengan adanya tujuan untuk mewujudkan semua program PKK maka kinerja dari ketua PKK memiliki peran yang sangat besar dalam mensukseskan semua program PKK, sehingga dapat terbentuknya Keluarga Sejahtera. Ketua PKK yang memiliki fungsi sebagai seorang pemimpin, dimana seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat memberi pengaruh kepada orang lain agar mereka berkontribusi dalam melakukan pengingat akan tujuan lembaga, dapat memberikan motivasi kerja untuk seluruh anggota PKK, menjadi jembatan aspirasi untuk setiap anggotanya dan pemimpin dapat memandu dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi atau untuk menyelesaikan misi. karena Peran dari ketua PKK sangat mempengaruhi kinerja setiap anggota PKK,

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Lhoksukon dalam Angka*, (BPS Kabupaten Aceh Utara, 2020), hlm 2.

selanjutnya keberhasilan kepemimpinan ketua PKK merupakan hasil yang ingin dicapai oleh setiap organisasi pemerintah manapun hal ini dikarenakan tercapainya efektivitas dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan secara terampil dan efektif.

Untuk tercapainya program PKK yang sesuai dengan harapan maka pola kerja dari ketua PKK memiliki pengaruh yang sangat penting, maka organisasi PKK melakukan pembinaan melalui 10 program pokok PKK yaitu: Penghayatan dan pengamalan Pancasila, Gotong royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan keterampilan, Kesehatan, Pengembangan kehidupan berkoperasi, dan Perencanaan sehat.[2] Dan dari setiap program di atas ketua PKK akan memilih dan membagi tugas kepada setiap kader PKK agar semua program dapat dijalankan dengan seksus. Dari semua program di atas diharapkan masyarakat dapat turut berpartisipasi mensukseskan program-program tersebut dan Organisasi PKK berharap dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Sesuai dengan BKKBN keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu: agama, sandang, pangan dan kesehatan dan masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap I (KS I) yang memiliki indikator: pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan berpergian, rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik, bila ada keluarga yang sakit

---

[2] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK*, (Jakarta, 2015), hal 13.

dibawa ke sarana kesehatan, dapat menggunakan sarana dan fasilitas KB bagi pasangan usia subur yang ingin ber KB, semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Dari indikator di atas rata-rata masyarakat sudah memenuhi kebutuhan dasar tersebut tetapi belum memehuni kebutuhan sosial psikologisnya. Sehingga pemerintah ingin mewujudkan keluarga sejahtera yang sudah dapat memenuhi tahapan keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III atau keluarga sejahtera III plus, sehingga anak-anak dapat menerima pendidikan sampai jenjang SMA atau perguruan, terpenuhinya kebutuhan psikologisnya, dapat membeli pakaian baru,dan dapat memebangun komunikasi yang baik dalam keluarga.[3] Berdasrkan pengertian diatas banyak keluarga di kecamatan Lhoksukon yang sudah memenuhi dapat kebutuhan keluarga sejahtera tahap I tapi belum dapat memenuhi keluarga sejahtera tahap II,III, dan III plus, dimana yang kita ketahui setiap keluarga yang masih dalam tahapan I masih menerima bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang cukup untuk semua anggota keluarga, banyak keluarga yang dapat menyekolahkan anaknya tapi belum bisa memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan sekolah, contohnya banyak keluarga yang belum mampu memberikan uang saku ketika anak-anaknya bersekolah dan belum bisa memenuhi keperluan sekolah dan banyak keluarga yang belum bisa menyediakan makanan 4 sehat 5 sempurna untuk keluarga dan lainnya. sehingga diharapakan dengan adanya program-program PKK dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan mewujudkan keluarga sejahtera tahap III. Dimana setiap keluarga

---

[3] Faturochman, Agus Dwiyanto, *Validias dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta, 1996), hal 38.

diharapka dapat memnuhii semua keperluan keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program pasti tidak pernah lepas dari faktor yang mendukung dan menghambat dalam berjalannya suatu kegiatan. Seperti halnya dalam pelaksanaan program PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera di Kecamatan Lhoksukon, ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program tersebut sehingga tidak selalu berjalan dengan lancar. Faktor yang mendukung program PKK di Kecamatan Lhoksukon adalah dukungan dari setiap Perangkat Gampong di Kecamatan Lhoksukon serta ketersediaan tempat untuk melaksanakan program PKK, dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PKK adalah kurangnya semangat dari masyarakat untuk mengikuti program PKK, kurangnya dana untuk melaksanakan program PKK, keterbatasan pengetahuan kader PKK, dan kurangnya fasilitas seperti alat-alat yang diperlukan dalam melaksanakan program PKK. Yang dimana seharusnya pihak PKK di Kecamatan dapat membangun komunikasi yang baik dengan setiap kader PKK yang ada Gampong, memantau semua kegiatan PKK yang ada di setiap Gampong secara rutin, memberikan pelatihan khusus untuk setiap kader PKK yang ada di Gampong, serta setiap Gampong menyediakan dana khusus untuk program-program PKK, sehingga program-prgram PKK dapat terlaksana dengan sukses.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Ketua PKK memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan pembinaan Keluarga Sejahtera, namun banyaknya hambatan yang terjadi dalam melaksanakan program-program PKK

membuat banyak program-program PKK tidak berjalan secara efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pola Kerja Ketua PKK dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola kerja Ketua PKK dalam melakukan pembinaan keluarga Sejahtera?
2. Apa saja peluang dan hambatan PKK dalam meningkatkan pembinaan keluarga Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola kerja Ketua PKK dalam melakukan pembinaan keluarga Sejahtera.
2. Untuk mengetahui peluang dan hambatan PKK dalam meningkatkan pembinaan keluarga Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, disamping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah & Komunikasi, juga diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti tentang Pembinaan Keluarga Sejahtera Serta menambah wawasan peneliti dalam melihat keterlibatan wanita dalam pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Sebagai bahan masukan kepada Pengurus Organisasi PKK di Kecamatan Lhoksukon dalam pembinaan keluarga sejahtera, dan juga sebagai bahan masukan bagi wanita khususnya di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

2. Secara Praktis

Dari manfaat teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan mahasiswa lain. Dan sebagai masukan bagi pihak akademik, sebagai bahan informasi tambahan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin membuat skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian "Pola Kerja Ketua PKK dalam Pembinaan Keluarga Sejahteran di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara" di pertegas maknanya sebagai berikut:

1. Pola Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaan akan lebih memungkinkan dicapai bila terdapat sebuah formulasi dan alur yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pegawai, oleh sebab itu diperlukan sebuah pola kerja yang dirancang pimpinan yang kemudian menjadi pendukung dan acuan dalam pencapain kerja tersebut. Schermerhorn mendefinisikan Pola Kerja adalah proses dimana manajer merencanakan dan menentukan tugas-tugas pekerjaan dan penyusunan kerja yang memungkinkan mereka untuk dicapai. Definisi pola kerja menurut Amstrong

جامعة الرانري
AR-RANIRY

adalah proses penentuan konten kerja dalam hal tugas dan tanggung jawabnya, metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, dalam hal teknik, sistem dan prosedur, dan hubungan yang harus ada antara pemegang pekerjaan dan atasan, bawahan dan rekan.[4] Berdasarkan paparan konsep para ahli, maka dapat disintesiskan bahwa pola kerja adalah proses penyusunan kerja yang dilakukan pimpinan agar mencapai hasil kerja yang diinginkan, dengan indikator penentuan tugas, penentuan kewenangan, spesifikasi tugas, relevansi tugas,dan revisi kerja.

Berdasarkan dengan pengertian pola kerja di atas peneliti ingin meneliti pola kerja yang diterapkan oleh para ibu geuchik yang ada di kecamatan Lhoksukon yaitu apakah setiap ketua PKK sudah memiliki informasi tugas dan pekerjaan yang akan disampaikan kepada setiap kader dan peserta PKK dan setelah itu mengembangkannya dalam bentuk perencanaan dan menyajikannya dalam bentuk dokumen setelah perencanaan kerja dibuat langkah selanjutnya adalah membuat keputusan atas semua kebutuhan yang diperlukan termasuk alat dan bahan atau material, setelah itu melaksanakan tugas yang telah ditentukan dan memperhatikan kinerja para anggota kader dalam melaksanakan tugas dan selama melaksanakan tugas yang ditetapkan juga disertai dengan pengontrolan apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan yang paling terakhir adalah melakukan evaluasi dengan mendiskusikan hal-hal apa saja yang telah dibuat. Dan diharapkan kepada ketua PKK dapat membangun komunikasi yang baik

[4] Abdul Rosyid, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Pola Kerja Terhadap Kinerja pegawai Tata Usaha SMPN di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat*, Jurnal Manajemen Pendidikan, hal 759-760.

dengan para kader dan setiap peserta PKK agar dapat membangun hubungan kerja yang baik dan dapat memotivasi para kader PKK dalam melaksanakan tugasnya.

Output yang ingin dihasilkan dari program-program PKK adalah apakah PKK sudah dapat menciptakan keluarga sejahtera yang sesuai dengan standar keluarga sejahtera, sehingga dari penelitian ini kita dapat mengetahui apakah program-program PKK yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan tepat atau tidak.

2. Kepemimpinan

Suksesnya sebuah organisasi tidak terlepas dari pengaruh seorang pimpinan mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Dalam menajalankan sebuah organisasi, dimana Menurut Hersey dan Blanchard menyatakan Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam perspektif yang Lebih sederhananya menurut, Morgan (1996 : 156) mengemukakan tiga macam peran pemimpin yang disebutnya dengan “3A”, yakni:

a. *alighting* (menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individunya).
b. *aligning* (menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap orang menuju kearah yang sama),

allowing (memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk menantang dan mengubah cara mereka bekerja).[5]

3. Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangun masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun mengarahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.[6]

4. Pembinaan

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.[7]

5. Keluarga Sejahtera

---

[5] AspizainChniago, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2017), hal 2

[6] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan Dan Kesejahteraan PKK*, (Jakarta: Tim Penggerak Pusat,2010), hlm 21

[7] Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm 84.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” adalah: ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kesabaran yang sangat mendasar di masyarakat.[8] Keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga-keluarga yang kurang mampu yang memiliki permasalahan ekonomi di dalam keluarganya terutama keluarga-keluarga miskin yang ada di Kecamatan Lhoksukon. Sehingga dengan adanya PKK dapat membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Lhoksukon.

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Berikut ini adalah indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera sesuai dengan tingkat kesejahteraan menurut BKKBN, yaitu :[9]

a. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*) :
    1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
    2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

---

[8] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996).

[9] Dini Puspita, dkk, *Klasifkasi tingkat keluarga sejahtera dengan menggunakan metode regresi logistik ordinal dan fuzzy K-Nearest Neighbor (studi kasus kabupaten temanggung tahun 2013)*, jurnal guassian, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, hal 646 – 647.

3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator ”kebutuhan psikologis” (*psychological needs)* keluarga, yaitu :
1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 untuk setiap penghuni rumah.
5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
7) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.

8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.[10]

c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*), yaitu :

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.

d. Indikator Kelurga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (*self esteem*), yaitu:

1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.[11]

---

[10] Dini Puspita, dkk, *Klasifikasi tingkat keluarga sejahtera dengan menggunakan metode regresi logistik ordinal dan fuzzy K-Nearest Neighbor (studi kasus kabupaten temanggung tahun 2013)*, jurnal guassian, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, hal 646 – 647.

[11] Dini Puspita, dkk, *Klasifkasi tingkat keluarga sejahtera dengan menggunakan metode regresi logistik ordinal dan fuzzy K-Nearest Neigbor (studi kasus kabupaten tamanggung tahun 2013)*, jurnal guassian, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, hal 646 – 647.

Berdasrakan standar keluarga sejahtera di atas maka pemerintah mengharapkan setiap keluarga dapat memenuhi indikator-indikator di atas sehingga dapat membantu menangani masalah kemiskinan dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, dari itu pemerintah menciptakan program PKK agar di setiap desa memiliki sebuah program yang fokus dalam meningkatkan keluarga sejahtera. Tetapi peneliti melihat di Kecamatan Lhoksukon program PKK belum berjalan sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat beberapa desa yang belum bisa mewujudkan keluarga sejahtera karena keterbatasannya penegetahuan ketua PKK terhadap program PKK , dan terdapat beberapa hambatan lainnya yang membuat program-program PKK tidak terealisasikan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pola Kerja

1. Pengertian Pola

Pola adalah model, contoh, pedoman (rancangan), dasar kerja. Pola adalah bentuk atau model (atau lebih abstrak suatu set peraturan) yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari suatu yang ditimbulkan cukup mempunyai satu jenis, untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola, deteksi pola dasar disebut dengan pengenalan pola.[12] Menurut Collin English Dictionary, pola (pattern) adalah:

a. Pola merupakan susunan dari unsur-unsur atau suatu bentuk-bentuk tertentu (*arrangement of lines, shapes*).
b. Cara dimana sesuatu itu terjadi atau tersusun *(when in which something happens or is arranged*)
c. Pola adalah desain atau kerangka dari sesuatu yang telah tercipta (*design or instruction from which something is to be made*).
d. Pola adalah sesuatu atau seseorang yang menjadi model atas sesuatu yang lainnya *(use something/somebody as a model for something/somebody*).[13]

[12] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. "*Kamus Ilmiah Populer*", (Surabaya, Arkola, 1994), hal 763.
[13] Thomas Hill Long, *Collins English Dictionary*, (London, 1979).

Berdasarkan dari teori diatas pola dapat diartikan sebagai cara kerja yang tersusun dari unsur-unsur atau bentuk tertentu, sehingga dengan adanya pola kerja yang tersusun dan terarah akan memudahkan ketua PKK dalam membagi tugas, dan mengarahkan setiap kader PKK dalam menjalankan tugas.

2. Pengertian Pola Kerja

Pola Kerja adalah suatu alat kerja berupa perencanaan yang operasional untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan secara bersama antara stakeholders (pihak-pihak yang berkaitan). Menurut Pola Kerja Terpadu, agar setiap usaha mencapai efisiensi dan efektifitas perlu dipastikan dahulu sasarnnya sebelum usaha atau kegiatan dilakukan. Adapun sasarannya dipilih diantara berbagai alternatif atas dasar pertimbangan yang terlihat dari kondisi, situasi, dan sumber- sumber yang tersedia.[14]

Tahapan dalam proses Pola Kerja Terpadu adalah :

a. Memilih sasaran, ada dua cara yang dapat digunakjan untuk memilih sasaran:

1) Teknik analisis terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi. Yaitu analisis tugas dimulai dari uraian tugas yang tersedia pada setiap unit kerja. Memilih sasaran melalui uraian tugas bertitik tolak dari Visi, Misi dan Tugas Pokok dan Fungsi dari unit organisasi. Analisis hasil pelaksanaan tugas dan peningkatan tugas.

[14] LAN RI, *Modul Diklat Substansi Diklat Pim IV*, (Jakarta, 2004).

2) Teknik analisis situasi. Teknik analisis situasi ini menggunakan analisis pohon, terdiri atas; pohon masalah, pohon sasaran dan pohon alternatif.

b. Menetapkan sasaran.

Sasaran yang dipilih dari pohon alternatif masih merupakan sasaran umum, belum merupakan sasaran yang segera dapat dilaksanakan. Sasaran khusus sifatnya adalah Spesifik, Berorientasi pada pada hasil, Terukur dari segi kualitas dan kuantitas, Kapan kegiatan akan dilaksanakan, Dimana tempatnya, Berapa lama, Kapan mulai dan kapan berakhir, Berapa jumlah biaya yang diperlukan, Dari mana sumbernya, unit mana yang akan bertindak sebagai pelaksana, Bila diperlukan bekerjasama dengan instansi luar.[15]

Sebuah sasaran yang baik untuk dipilih adalah sasaran yang bermanfaat dan paling menguntungkan bagi organisasi, jelas dan realistik, dapat diukur dan diamati dari segi kualitas, biaya dan waktu, ditetapkan bersama atasan dan bawahan, bersama-bersama dengan unit lain yang setingkat mendukung sasarannya dari unit yang setingkat lebih tinggi dan dinyatakan dalam bentuk selesai.

c. Memvalidasi sasaran

Validasi sasaran merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa sumber dana, bahan, metode, organisasi, prosedur, dan tenaga kerja dinyatakan siap untuk mewujudkan sasaran. Sasaran khusus merupakan

[15] LAN RI, *Modul Diklat Substansi Diklat Pim IV*, (Jakarta, 2004).

sasaran tentatif yang harus divalidasikan menjadi sasaran definitif.[16]

Action pola kerja profesional:

a. *Inform*: informasi tugas atau pekerjaan yang disampaikan.
b. *Plan*: mengembangkan dalam bentuk perencanaan dan menyiapkan dokumen secara tertulis.
c. *Decide*: perencanaan kerja dibuat, dan keputusan diambil atas semua kebutuhan yang diperlukan termasuk alat dan bahan/material.
d. *Carry out*: tugas dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja yang ditentukan.
e. *Control*: pengecekan hasil kerja
f. *Evaluate*: melakukan evaluasi dengan mendiskusikan hasil kerja yang telah dilaksanakan.[17]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Pola Kerja merupakan rincian dari kegiatan besar yang disusun menjadi lebih terorganisir, sehingga kita dapat menentukan tahapan persiapan, pelaksanaan dan pengendalian agar kegiatan yang kita laksanakan menjadi lebih efektif dan efisien.

B. Kepemimpinan

Menurut Hersey dan Blanchard Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi.[18]

---

[16] LAN RI, *Modul Diklat Substansi Diklat Pim IV*, (Jakarta, 2004).
[17] A.F. Octa Pertiwi, *action pola kerja profesional*, jakarta: 2019.
[18] AspizainChniago, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2017), hal 2.

Kepemimpinan merupakan proses yang harus ada dan perlu diadakan dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial. Staf Dosen Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gajah Mada mengartikan kepemimpinan sebagai proses pengaruh-mempengaruhi antara pribadi atau antara orang dalam suatu situasi tertentu, melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu.[19] Sarwono Prawiroharjo, mengartikan kepemimpinan sebagai tingkah laku untuk mempengaruhi orang lain agar memberikan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang menurut pertimbangan mereka adalah perlu dan bermanfaat.[20] George R. Tery merumuskan *" Leadership is the relationship in which one person, or the leader, influences others to work together willingty on related tasks to atain that which the leader desires"* (Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri orang – orang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin). Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok.[21]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk dapat melaksanakan perintahnya dalam menjalakan sebuah tugas agar tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi.

1. Gaya kepemimpinan

---

[19] Hamzah Ya'qub, *Menuju Keberhasilan Manajemen dan Kepemimpinan*, (Bandung Diponegoro, 1984), hal 124.

[20] Hamzah Ya'qub, *Menuju Keberhasilan Manajemen dan Kepemimpinan*,hal 124.

[21] George R.Terry, *Princiles of Management*, Edisi ke-6, Richard D.Irwin Homewood, (Illionis,1972), hal 458.

Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” (lead) berarti bimbing atau tuntun.[22] Kepemimpinan sendiri adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan (Leadership Style), yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap keterampilan dan sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu.

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu.

2. Macam-macam gaya kepemimpinan

a. Gaya kepemiminan otokratis

Istilah otokrasi berasal dari bahasa yunani. Istilah otokratis berasal dari dua kata yaitu: autos dan kratos. Autos berarti sendiri atau diri pribadi, kratos adalah kekuasaan atau kekuatan. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Jadi otokratis berarti berkuasa sendiri secara mutlak (centre of authority).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[22] Drs. Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumberdaya Menusia*, (jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal 167.

Kepemimpinan otokratis merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan prilaku otoriter.[23]

Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan.[24]

b. Gaya kepemimpinan Demokratis

Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter.Disini pemimpin ikut berbaur dan berada ditengah-tengah anggotanya.Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri.Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas.Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya.[25]

c. Gaya kepemimpinan kharismatik

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain, maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau masa yang jumlahnya besar. Sifat kharismatik yang dimiliki adalah karunia dari tuhan. Pemimpin

---

[23] Drs. Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bumi Aksara (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) hal 167.

[24] Drs. Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, hal 171.

[25] Malayu Hasian Teori Dan Praktek Kepemimpinan, Rineka Cipta (Jakarta: Rineka Cipta 2010) hal 40.

kharismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara, berjalan maupun bertindak.[26]

d. Gaya Peternalistik

Tipe pemimpin ini memiliki sifat kebapakan, mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Pemimpin ini selalu melindungi bawahannya. Pemimpin paternalistik memiliki sifat maha tahu yang besar sehingga jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan.[27]

Dari hasil pernyataan diatsa dapat disimpulkan bahwa setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memimpin sebuah organisasi. Kepemimpinan otokratis meemiliki kelebihan ketua dapat mengambil keputusan dengan karena mutlak hak pemimpin, mudah melakukan pengawasan dan kekurangannya anggota tidak bisa berinovasi, pemimpin terlalu berkuasa. Gaya kepemimpinan demokratis memiliki kelebihan yang dapat menjalin hubungan yang hermonis antara pemimpin dan bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya, kekurang dari gaya kepemimpinan ini adalah Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah, Sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karna pendapat setiap orang jelas berbeda. Gaya kepemimpinan kharismatik meiliki kelebihan Dapat

---

[26] Mila badriyah, *Manajeme Sumber Daya Manusia*, (Pustaka setia bandung: 2008) hal 56.

[27] Mila badriyah, *Manajeme Sumber Daya Manusia*, hal 33.

mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas, Dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat, dan kekurangannya adalah Para pemimpin kharismatik mudah mengambil keputusan yang beresiko, Ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten sulit. Dan gaya kepemimpinan peternalistik memiliki kelebihan Pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan, Bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan dan kekurangganya adalah Bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan, Keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang benar.

C. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1. Pengertian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin. Pemberdayaan Keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan kepada keluarga dalam upaya meningkatkan kemampuan keluarga untuk hidup sehat sejahtera lahir dan batin.[28]

[28] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK*, (Jakarta: 2015), hal 9.

Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.[29]

2. Visi dan Misi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

a. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.[30]

b. Misi

1) Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender.

2) Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi.

---

[29] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK*.
[30] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK*...,hal 8

3) Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni.

4) Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat.

5) Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan Sumberdaya Manusia.[31]

3. Tujuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.[32]

4. Sasaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di perdesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang:[33]

a. Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan.

---

[31] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejah teraan Keluarga PKK,(*Jakarta: 2015) hal 8.

[32] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK*...,hal 12.

[33] Tim Penggerak PKK Pusat, Pemberdayaan dan Kesejah teraan Keluarga PKK...,hal 12-13.

5. Program Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK)

Program PKK adalah 10 Program Pokok PKK yaitu:

a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Maksudnya yaitu dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila diharapkan terwujudnya keluarga yang berakhlak, bersikap serta memiliki tingkah laku yang berdasar pada Pancasila. Memiliki kesadaran dan pengamalan terhadap kehidupan beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati sesama manusia yaitu bersikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan kepentingan Bangsa di atas kepentingan pribadi, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan, kesetiaan kepada Negara dan Bangsa serta kewajiban mentaati peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku.

b. Gotong Royong

Gotong royong dimaksudkan agar di dalam keluarga tercipta perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan dan kekeluargaan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.

c. Pangan

Dimaksudkan untuk menanamkan kesadaran betapa pentingnya makanan sehari-hari yang sehat dan bergizi serta pengolahan makanan yang sesuai dengan kegunaannya untuk pertumbuhan dan kesehatan jasmani/rohani dalam membentuk keluarga yang sehat, cerdas dan kuat.

Mengajarkan agar halaman yang kosong dimanfaatkan untuk ikut meningkatkan produksi pangan.

d. Sandang

Memberikan pengertian tentang cara dan fungsi berpakaian sesuai dengan kepribadian, usia dan situasi. Perlu diusahakan adanya sandang dalam jumlah yang cukup, terpelihara dan sehat serta perlu ditanamkan pengetahuan tentang membuat pakaian, memilih bahan dan pola yang sesuai dengan kemampuan keluarga dan keadaan setempat.

e. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Pentingnya diajarkan tentang perbaikan perumahan sesuai dengan pola rumah sehat dan murah, mengatur dan merawat rumah serta halaman sebaik-baiknya. Karena perumahan berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung serta dapat memberikan rasa hidup tenteam, aman dan bahagia, karena itu harus selalu diusahakan perumahan yang memenuhi kesehatan, teratur lingkungan dan tata laksananya untuk meningkatkan mutu hidup.

f. Pendidikan dan Keterampilan

Dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi penerus dengan sebaik-baiknya agar mereka dapat melaksanakan tugasnya di masa yang akan datang melalui pendidikan dan keterampilan. Dengan pendidikan dibentuk manusia yang berdasarkan Pancasila, yaitu meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga, seperti pengertian tentang arti anak bagi keluarga, kewajiban orang tua terhadap anak, cara mendidik, merawat dan membimbing anak, pendidikan budi pekerti, Agama dan persiapan anak-

anak untuk mendapatkan pendidikan dasar, kejuruan atau ketrampilan maupun pendidikan non formal serta pendidikan seumur hidup.

g. Kesehatan

Kesehatan merupakan syarat mutlak untuk kebahagiaan hidup, karena itu perlu dihayati apa itu sehat dan bagaimana cara memelihara kesehatan, baik pribadi maupun keluarga, kepada kesehatan lingkungan.

h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Perlunya dikembangkan kesadaran kehidupan berkoperasi di kalangan keluarga karena koperasi merupakan dasar dari pada Demokrasi Ekonomi, yang dikerjakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Selain itu perlu ditanam dan dikembangkan kesempatan berusaha baik sebagai pribadi, keluarga maupun masyarakat, agar melalui usaha bersama berkembang pula kesempatan kerja.

i. Kelestarian Lingkungan Hidup

Dimaksudkan agar di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya terdapat keserasian, sehingga adanya perasaan tenang, tentram, hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga maupun dengan tetangga, termasuk juga dengan kelestarian alam sekitarnya.

j. Perencanaan Sehat

Perencanaan sehat bagi keluarga meliputi urusan keseimbangan pendapatan dan belanja rumah tangga, pengaturan waktu, pembagian tugas antar keluarga sesuai kemampuan masing-masing agar dengan mengorganisir dirinya dan keluarganya memungkinkan masing-masing

anggota keluarga berperan secara optimal, baik dalam kegiatan-kegiatan masyarakat maupun pembangunan. Dalam hubungannya dengan mengatur kehidupan keluarga di masa datang, maka perlu dikembangkan pola keluarga kecil melalui Keluarga Berencana.[34]

6. Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan

Tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK[35]. Anggota Tim Penggerak PKK adalah warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai penyuluh, penggerak dan pengelola gerakan PKK. Adapun tugas Tim Penggerak PKK adalah :[36]

a. Menyusun rencana kerja Tim Penggerak PKK sesuai hasil Rakerda Kabupaten /Kota.
b. Menginformasikan, mengkomunikasikan, mengkonsultasikan Rencana kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan pembinaan pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat-Kabupaten/Kota selaku pembina Tim Penggerak PKK,agar Rencana

---

[34]Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK*, (Jakarta: 2015), hal 13-15.

[35] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejah teraan Keluarga PKK*..., hal 10.

[36] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK*...,hal 30-31.

kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan atau umpan balik kepada tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
d. Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dengan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, Dunia Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejahteraan dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.
e. Menyusun dan mengirim laporan kepada ketua pembinaTim Penggerak PKK setempat atau ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/kota.
f. Melaksanakan tertib adiministrasi sesuai ketentuan.
g. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Tim Penggrak PKK Desa/Kelurahan.[37]

D. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina.[38] Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, rerencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu

[37] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejah teraan Keluarga PKK*, (Jakarta: 2015), hal 31.
[38] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusia yang optimal dan pribadi yang mandiri.[39]

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

1. Pendekatan informatif (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
2. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
3. Pendekatan eksperiensial (*experience approach*), dalam pendekatan ini menetapkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.[40]

---

[39] Simanjuntak, B.I.L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung : Tarsito, 1990), hal 84.

[40] Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanimus, 1986).

E. Keluarga Sejahtera

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan social dari individu-individu yang ada di dalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama.[41]

Keluarga sebagai perkumpulan dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam peranannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.[42]

Dari pengertian keluarga diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah seperangkat bagian yang saling tergantung satu sama lain serta memiliki perasaan beridentitas dan berbeda dari anggota dan tugas utama keluarga adalah memelihara kebutuhan psikososial anggota-anggotanya dan kesejahteraan hidupnya secara umum.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki

---

[41] Friedman, M. Marilyn, *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*, (Jakarta: EGC,1998).

[42] Arita, Setyowati, *Asuhan Keperawatan Keluarga*,(Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), hal 20.

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.[43]

2. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Menurut BKKBN

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan beserta indikator-indikatornya yaitu:[44]

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).
b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI) Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga. Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*), dari 6 indikator keluarga sejahtera yaitu:
    1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.
    2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga

[43] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009.
[44] BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK*, (Jakarta, 2019).

tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda.[45]

3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.
4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).
5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada

[45] BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK*, (Jakarta: 2019).

pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).[46]

6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7- 15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/sederajat SD atau setingkat SLTP/sederajat SLTP.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator tahapan KS III. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator ”kebutuhan psikologis” (*psychological needs)* keluarga, dari indikator keluarga sejahtera yaitu:[47]

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

---

[46] BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK*, (Jakarta;2019).
[47] BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK*,(Jakarta: 2019).

4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 untuk setiap penghuni rumah. Luas Lantai rumah paling kurang 8 m^2 adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m^2.
5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
7) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.[48]

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi

[48] BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK*, (Jakarta: 2019).

tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga. Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*), dari indikator keluarga sejahtera yaitu:[49]

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-
3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus. Dua indikator Keluarga

[49] BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK*, (Jakarta: 2019).

Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) dari indikator keluarga, yaitu:

1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.[50]

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, meliputi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan, serta dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Tahapan keluarga sejahtera di identifikasi dengan menggunakan 13 variabel. Variabel tersebut meliputi: agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, informasi, transportasi, dan peranan dalam masyarakat. Ketiga belas variabel tersebut kemudian dituangkan menjadi empat kelompok. Setiap kelompok mengukur tingkat kesejahteraan keluarga. Kelompok tersebut juga disusun secara hierarkis mulai dari item-item untuk mengukur kesluarga sejahtera tahap I, II, III, dan III plus. Bila sebuah keluarga memenuhi semua kriteria seperti tertuang dalam item-item kelompok I, keluarga tersebut telah dianggap masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap 1. Bila ada salah satu item yang tidak terpenuhi, keluarga yang bersangkutan masuk dalam tahapan keluarga pra sejahtera. Untuk dapat masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap II, sebuah keluarga harus memenuhi semua kriteria atau item-item tahap I

[50] BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK*, (Jakarta: 2019).

dan II. Bila ada salah satu kriteria tahap II yang tidak terpenuhi, keluarga tersebut hanya terkategori ke dalam tahap I. Untuk dapat masuk kategori III, keluarga tersebut harus memenuhi kriteria tahap I,II, dan III. Demikian juga untuk masuk kategori III plus, kategori yang harus dipenuhi adalah kriteria tahap I, II, III, dan III plus. Salah satu ciri dari pengukuran keluarga sejahtera dengan model ini adalah ketatnya kriteria yang harus dipenuhi dan disusun secara hierarkis. Jadi, meskipun sebuah keluarga memenuhi kriteria tahap II, III, dan III plus, salah satu item dalam tahap I tidak terpenuhi maka keluarga tersebut masuk kategori pra sejahtera.[51]

Dari gambaran keluarga sejahtera diatas dapat kita lihat, keluarga sejahtera yang diharapkan oleh pemerintah adalah keluarga yang dapat memenuhi standar di atas, walaupun tidak semua masyarakat dapat memenuhi tahapan keluarga sejahtera III plus, yang sudah dapat memberikan hal lebih untuk keluarga yang lain tetapi, yang diutamakan dalam keluarga sejahtera adalah setiap keluarga dapat menerima kebutuhan dasar yaitu: agama, sandang, pangan, dan kesehatan, serta dapat memenuhi sosial psikologisnya, dan dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sehingga semua masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang yang sesuai dengan standar keluarga sejahtera. Dan adaya PKK yang hadir dalam masyarakat diharap dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

---

[51] Faturocman, Agus Diyanto, *Validitas dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera*, Vol 1 No 9, 1996, hal 38.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada beberapa penelitian terkait masalah Pola Kerja Ketua PKK dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebagai berikut:

Jam'ah Harahap dalam skripsinya yang berjudul "Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pemberdayaan wanita di Desa Simatahari Kecamatan kota pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan". Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa: peran dari kader PKK dalam mengembangkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam hal pemberdayaan Life Sklil masyarakat yang ada di Desa Simatahari dengan memberikan pelatihan-pelatihan cara membuat tas dari tali kur, cara membuat sabun cair, memasak. Pihak PKK memberikan pelatihan yang dapat membantu memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, karena para kader PKK tidak hanya mengajarakan cara membuatnya tapi juga mengajarkan bagaimana cara memasarkan barang yang telah mereka buat. Sehingga sangat berfungsi untuk setiap masyarakat. Dan dalam skripsi Jam'ah Harahap tidak hanya menjelaskan peran kader PKK dalam melakukan pemberdayaan *life skill* tetapi juga memberikan pemberdayaan dibidang rohani dan kesehatan. Yang membedakan penelitin ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pemberdayaan perempuan di desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan batu Selatan, sedangkan objek penelitian penulis adalah pemebinaan keluarga sejahtera di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Nurazmi Izmi Rusdi didalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun". Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa: program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kecamatan Siantar yang dipimpin oleh istri Camat, yang beran aktif membantu dalam pemberdayaan masyarakat di Nagori dalam menjalankan Program PKK yang memiliki sepuluh poin utama yakni penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Melalui program PKK diharapkan perempuan memiliki wadah untuk beraktualisasi, sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian, pada penelitin ini yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, yang memebahas bagaimana pelaksaan program PKK yang dijalankan di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana pola kerja ketua PKK dalam melakukan pembinaan keluarga sejahtera.

Yusrawati di dalam skripsinya yang berjudul "Partisipasi masyarakat dalam program pokok pembinaan kesejahteraan keluarga di desa Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar" berdasarkan analisis data menunjukkan Tahapan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program PKK Desa

Bonerate dimulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil. Dan bentuk partisipasi masyarakat PKK Desa Bonerate dalam penyelenggaraan program-program terbagi dalam dua bentuk fisik yaitu material dan tenaga dan non fisik yaitu ide. Dalam proses pelaksanaan program PKK pertisispasi masyarakat merupakan salah satu kewajiban bagi masyarakat karena masyarakat adalah subjek dari program PKK, sehingga jika masyarakat tidak berpartisipasi maka program PKK tidak dapat dilaksanakan.

Mirna Wati di dalam skripsinya yang berjudul "Peran PKK (pemberdayaan keluarga sejahtera) dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa Aksa Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai " berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa: Peran PKK dalam Peningkatkan perekonomian masyarakat desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terhadap peningkatan ekonomi masyarakat ditandai dengan pemerolehan pengetahuan, keterampilan yang diberikan oleh tim penggerak PKK, sehingga akan meningkatkan keterampilan masyarakat. ketika keterampilan meningkat secara otomatis pendapatan rumah tangganya juga ikut meningkat. akan tetapi lebih jauh lagi adalah memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya yang meneliti tentang peran PKK dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dan peneliti meneliti tentang Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera di Kecamata Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang akan penulis teliti, akan tetapi tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian diatas, oleh karena itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

G. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1 kerangka berfikir.

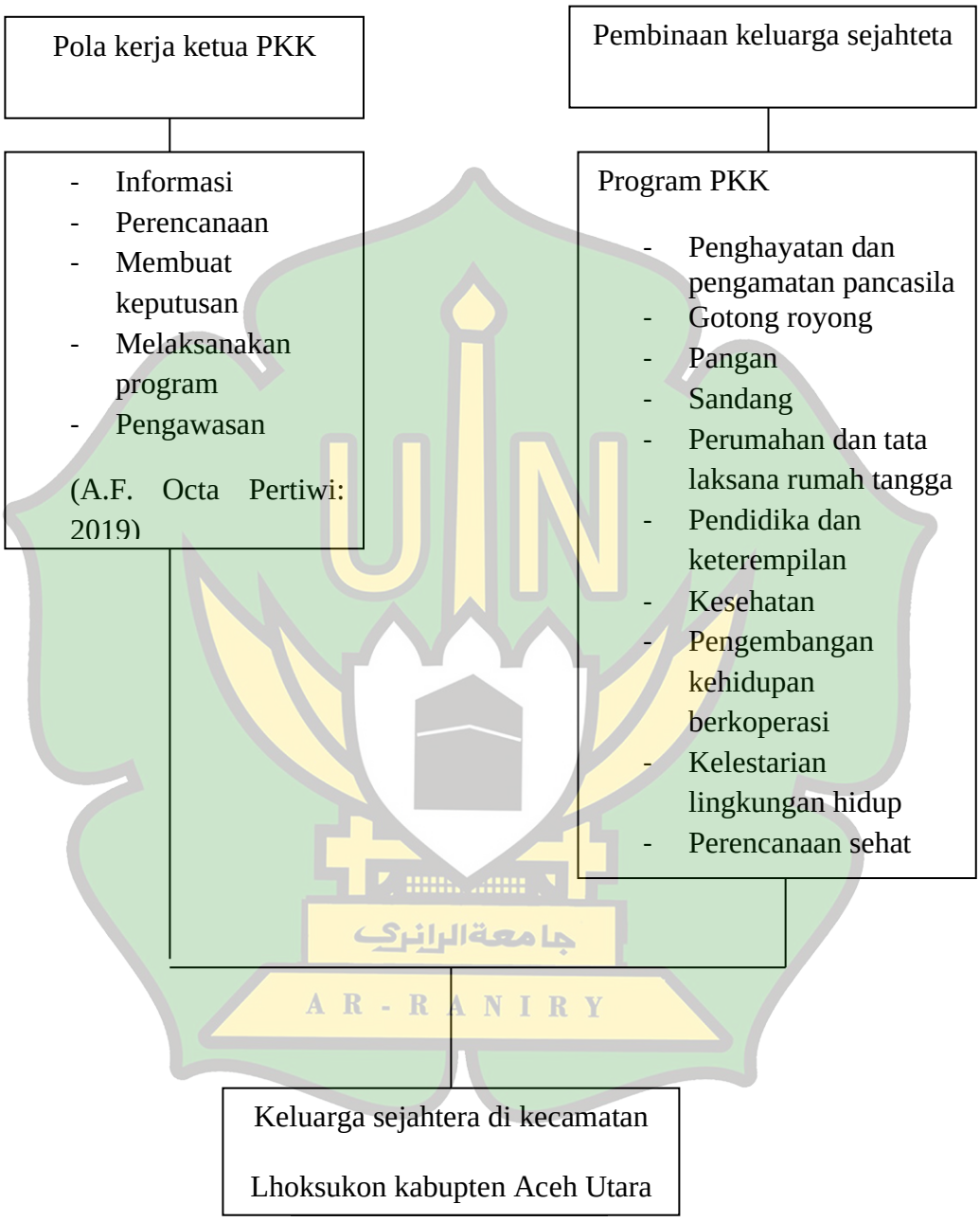

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.[52] Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.[53]

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta

---

[52] Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4.

[53] Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 28.

yang berhubungan dengan aktivitas para kader PKK dalam mensukseskan semua program-program PKK di Kecamatan Lhkoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.[54]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Fokus penelitian ini akan dilakukan di beberapa Gampong yang ada di Kecamatan Lhoksukon yaitu, Gampong Asan LB, Gampong Gampong Matang Teungoh AB, Kota Lhoksukon. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Kecamatan Lhoksukon adalah Kota kelahiran peneliti dan peneliti lebih memahami situasi dan kondisi di kecamatan Lhoksukon, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

C. Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik bentul dalam statistik atau

---

[54] Sugiyono, *Memahami Penelitian,* (Bandung: CV Alfabeta: 2005), hal 2.

dalam bentuk lainnya keperluan yang dimaksud.[55] Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (nara sumber). Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu bersumber dari wawancara langsung dan wawancara mendalam (*indent interview*) dengan pihak pengurus PKK, dan masyarakat wanita yang telah merasakan dari hasil program pemberdayaan Keluarga Sejahtera yang diterapkan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertai Peraturan Perundang-undangan, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya buku-buku yang terkait dengan judul penelitian, Dokumentasi kegiatan PKK dalam pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu hal yang penting dalam penelitian, karena teknik ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni:

---

[55] P Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori Praktek*, Cet Ke:IV (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hal 87.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.[56] Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung dan mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu masalah Pola Kerja Ketua PKK dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

2. Wawancara

merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.[57] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada ketua PKK, pengurus tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dan kepada masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan PKK dalam hal pemberdayaan Keluarga Sejahtera. Dari hasil wawancara ketua PKK, TP PKK, dan masyarakat peneliti dapat melihat hasil wawancara apakah ketua PKK sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan program atau ketua PKK memiliki banyak kendala dalam menjalankan program.

Tabel 3.1 informan yang akan diwawancarai oleh peneliti

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan	Gampong
1.	NV	SMA	Ketua PKK	Matang teungoh
2.	HA	SMA	Kader PKK	Matang teungoh

[56] V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hal 31.

[57] Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skrip*si, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006) hal 92.

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Gampong
3.	NB	SMA	Masyarakat	Matang teungoh
4.	ZR	S1	Ketua PKK	Kota Lhoksukon
5.	YL	S1	Kader PKK	Kota Lhoksukon
6.	WY	S1	Masyarakat	Kota Lhoksukon
7.	IH	SMA	Ketua PKK	Asan LB
8.	SN	S1	Kader PKK	Asan LB
9.	AS	SMA	Masyarakat	Asan LB

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dalam bentuk catatan ataupun tulisan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan digunakan untuk memperkuat data yang telah dperoleh sebelumnya.[58] Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Dokumen-dokumen yang penulis kumpulkan diantaranya data-data yang berupa buku tentang PKK, pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan lain-lain.

E. Subjek Penelitian

Dalam konteks penelitian, subjek adalah seseorang atau suatu (benda) yang ingin diperoleh data atau informasi. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah Pengurus TP PKK, dan masyarakat yang telah merasakan hasil program pemberdayaan keluarga Sejahtera yang diterapkan di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

[58] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm 274

F. Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif.[59] Yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik induktif dan deduktif. Adapun tahapan menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni ketua PKK melalui wawancara kegiatan yang dilakukan dalam rangka peran PKK dalam pemberdayaan Keluarga Sejahtera. Setelah data yang diperoleh dianalisis, maka peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya. Sumber data berikutnya yaitu anggota PKK lainnya yaitu ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi PPK, dan telah merasakan program yang telah diterapkan PKK dalam Pemberdayaan Wanita di Kecamatan Lhoksukon.
2. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu mereduksi data, data dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber data serta hasil dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

[59] Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta,2003), hal 65.

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dengan menggunakan reduksi data maka penelitian ini lebih fokus kepada peran PKK dalam pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

3. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya. Kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.
4. Tahap terakhir yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembanag sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Lhoksuon Kabupaten Aceh Utara

Kecamatan Lhoksukon adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Lhoksukon juga berperan sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Lhoksukon memiliki luas 243 Km^3 = 24.300 Ha, banyaknya kemukiman adalah 4 dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 51974 jiwa. Kecamatan ini berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Lapang

Sebelah Selatan : Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Pirak Timu

Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Matangkuli

Sebelah Timur : Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Barat[60]

Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 75 desa di antaranya : Geulumpang, Mns Buloh , Alue , Alue Eumpok, Alue Itam Reudeup, Buket Krueng, Mns Teungoh LB, Mns Kumbang, Alue Itam Baroh, Meuriya, Arongan LT, Buket Me, Dayah LT, Mns Krueng, Mns Tuha, Mns Rayeuk, Mns Meucat , Mns Asan LB, Mns Rawa, Geudubang, Mns Meureubo, Ulee Gunong, Teupin Keubeu, Seuneubok Dalam, Grong Grong, Lhok Kareung, Cot Asan, Buket Hagu, Mata Ie, Mata U, Lhok Sentang, Ulee Tanoh, Nga Lsk Tengah, Mns Jok, Mns Nga Lsk Barat, Matang Meunye, Mns Beuringen, Mns Manyang, Mns Blang, Mns Ceubrek, Kel Kota Lhoksukon, Meunasah Dayah, Mns Mtg Teungoh LT, Mns Geulinggang, Ulee Barat, Mns Pulo Dolang, Meunasah Tutong ,

[60] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Lhoksukon dalam Angka 2021*, BPS Kabupaten Aceh Utara, 2021, hal 2.

Geumata, Trieng Matang Ubi, Mns Meunye, Blang Rubek, Alue Buket, Reudeup, Nga Mtg Ubi, Buket Sentang, Blang Aman, Mns Cot Usibak, Bintang Hu, Cot Ara, Cot Glumpang, Abeuk Leupen, Matang Pupanji, Matang Teungoh AB, Meunasah Asan AB, Ranto, Keutapang, Alue Mudem, Rambot, Meunasah Ara, Mns Alue Drien LB, Mns Mancang, Leubok, Trieng Pantang, Mns Arongan AB.[61]

Kecamatan Lhoksukon terdiri dari 4 kemukiman yaitu:

a. Kemukiman Lhoksukon Tengah.
b. Kemukiman Lhoksukon Barat.
c. Kemukiman Matang Ubi.
d. Kemukiman Ara Bungkok.

Jumlah fasilitas dan sarana pertanian di kecamatan Lhoksukon:[62]

Tabel 4.1 jumlah fasilitas dan sarana pertanian yang terdapat di kecamatan Lhoksukon.

No	Fasilitas dan Sarana	Jumlah
1.	Kilang Padi	35
2.	Pasar Hewan	1
3.	Traktor/Hand Tarktor	56
4.	Mesin Perontok Gabah	41
5.	Rumah Potong Hewan (RPH)	1
6.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-
7.	Tempat Pendaratan Ikan	-
8.	Kapal Penangkap Ikan	-
9.	Perahu Motor Tempel	-
10.	Perahu Tanpa Motor	9

[61] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Lhoksukon dalam Angka 2021*, BPS Kabupaten Aceh Utara, 2021, hal 5.

[62] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Lhoksukon dalam Angka 2021*,..., hal 99.

Jumlah sarana dan prasarana:[63]

Tabel 4.2 jumlah banguan dan prasarana di kecamatan Lhoksukon

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1	Kantor desa	2
2	Balai desa	2
3	Sekolah Dasar (SD)	31
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2
7	Perguruan Tinggi	1
8	Kantor Catatan Sipil	1
9	PDAM	1
10	Masjid	18
11	Meunasah	79
12	Mushalla	-

Jumlah sarana Pelayanan Kesehatan Utama:[64]

Tabel 4.3 jumlah sarana pelayanan kesehatan utama di kecamatan Lhoksukon

No	sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Poliklinik/Balai Pengobatan	1
2.	Puskesmas	2
3.	Pustu	7
4.	Praktek Dokter	6
5.	Praktek Bidan	7
6.	Posyandu	84
7.	Polindes	40
8.	Apotek	3
9.	Toko Obat	11

[63] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Lhoksukon dalam Angka 2021*, BPS Kabupaten Aceh Utara, 2021, hal 60.

[64] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Lhoksukon dalam Angka 2021*,..., hal 75.

Jumlah Kendaran Angkutan Umum dan Jenisnya:[65]

Tabel 4.4 jumlah kendaraan angkutan umum dan jenisnya di kecamatan Lhoksukon.

No	Jenis Kendaran Angkutan Umum	Jumlah
1.	Beca Barang Bermotor	59
2.	Beca Barang Dayung	21
3.	Beca Penumpang Bermotor	42
4.	Beca Penumpang Dayung	10
5.	Ojek Motor	403
6.	Ojek Sepeda	-
7.	Angkutan Kota	72
8.	Angkutan Pedesaan	-
9.	Truk/Pick Up	96

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah gampong Matang Teungoh, gampong Asan LB, dan kota Lhoksukon. Inilah profil dari setiap gampong yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Gampong Matang Teungoh

Gampong Matang Teungoh merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Lhoksukon yang memiliki luas 380 km^2, yang terdiri dari 3 dusun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 749 jiwa, dengan jenis kelamin 384 laki-laki dan jenis kelamin 365 perempuan. Pendudukan gampong Matang Teuugoh rata-rata bekerja sebagai petani dan salah satu desa yang menerapkan program-program PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera.[66]

[65] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Lhoksukon dalam Angka 2021*, BPS Kabupaten Aceh Utara, hal 110.

[66] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara...,hlm 34.

2. Gampong Asan LB

Gampong Asan LB merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Lhoksukon yang memiliki luas 241 km^2, yang terdiri dari 3 dusun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 869 jiwa, dengan jenis kelamin 439 laki-laki dan jenis kelamin 430 perempuan. Pendudukan gampong Asan LB rata-rata bekerja sebagai petani dan salah satu desa yang menerapkan program-program PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera.[67]

3. Kota Lhoksukon

Kota Lhoksukon merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Lhoksukon dan juga berperan sebagai ibu kota Lhoksukon yang memiliki luas 143 km^2, yang terdiri dari 5 dusun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2231 jiwa, dengan jenis kelamin 1208 laki-laki dan jenis kelamin 1023 perempuan. Pendudukan Kota Lhoksukon rata-rata bekerja sebagai pedagang dan salah satu desa yang menerapkan program-program PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera.[68]

B. Gambaran umum ketua PKK Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Objek penelitian yang peneliti teliti adalah para ketua PKK yang ada di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah ketua PKK Matang teungoh, ketua PKK kota Lhoksukon, dan ketua PKK Asan LB. Proses pengangkatan ketua PKK dilakukan sesaui

---

[67] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Lhoksukon dalam Angka 2021*, BPS Kabupaten Aceh Utara, 2021, hal 33.

[68] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara...,hal 32.

dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 07/KEP/PKK.Pst/IX/2015 tanggal 14 September 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Rapat Kerja Nasional VIII Tim Penggerak PKK Tahun 2015. Pada nomor 11 yang isi adalah:

1. Apabila istri Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua Umum TP PKK/Ketua TP PKK di wilayahnya berhalangan tetap, Ketua Pembina TP PKK menyetujui Ketua/Wakil Ketua TP PKK, sebagai Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.
2. Apabila dalam masa jabatan Ketua Umum tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti, maka salah satu Ketua ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum oleh Ketua Pembina TP PKK Pusat.
3. Apabila dalam masa jabatan Ketua TP PKK di Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti, maka Wakil Ketua TP PKK, ditetapkan sebagai Pejabat Ketua TP PKK Daerah dengan Keputusan Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya yang disetujui oleh Ketua Pembina TP PKK setempat.
4. Apabila ada pergantian Menteri Dalam Negeri melalui adanya Penjabat, maka jabatan Ketua Umum TP PKK, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pembina TP PKK Pusat.
5. Apabila ada pergantian Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah dengan adanya Penjabat, maka Ketua TP PKK di daerah adalah istri Penjabat tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan dari Ketua

Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya. Acara Penyerahan Keputusan dilanjutkan dengan acara serah terima yang disaksikan oleh Ketua Pembina setempat.[69]

Setiap ketua PKK di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dalam menjalankan kepemimpinananya, ketua PKK di gampong Matang teungoh memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung otokratis karena ketua PKK di gampong Matang teungoh sering membuat sebuah keputusan tanpa meminta semua pendapat para anggota PKK, tidak terlalu ramah dengan emua anggotanya, dan ketika ketua PKK Matang teungoh memutuskan sebuah kegiatan maka para anggota harus menyetejui keputusannya.

Gaya kepemimpinan yang diterapka oleh ketua PKK kota Lhoksukon adalah gaya kepemimpinan demokratis karena ketua PKK kota Lhoksukon memiliki sifat yang dapat mengyomi para bawahannya dan dapat membangun hubungan yang harmaonis antar para kader PKK, dimana kepemimpinan seperti ini bisa menjadi jembatan untuk para anggota dalam mengembangkan sebuah inovasi serta membantu para anggotanya untuk selalu dapat mengutarakan pendapat dalam sebuah organisasi. Dan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh ketua PKK gampong Asan LB adalah campuran gaya otokratis dan demokratis karena ketua PKK gampong Asan LB hanya mendengarkan para kader yang dekat dengannya saja dan kalau sudah membuat keputusan ketua PKK terkadang tidak mendengarkan pendapat kader yang lain, dan ketua PKK gampong Asan LB

---

[69] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan Dan Kesejahteraan PKK*, (Jakarta: Tim Penggerak Pusat,2010), hal 10-11.

sudah bisa menjalin hubungan yang baik antar para kader walaupun terkadang ketua PKK tidak selalu mendengar pendapat mereka, dan yang lebih dominan dalam gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan demokratis.

Gambar 4.1 struktur TP-PKK gampong Matang teungoh

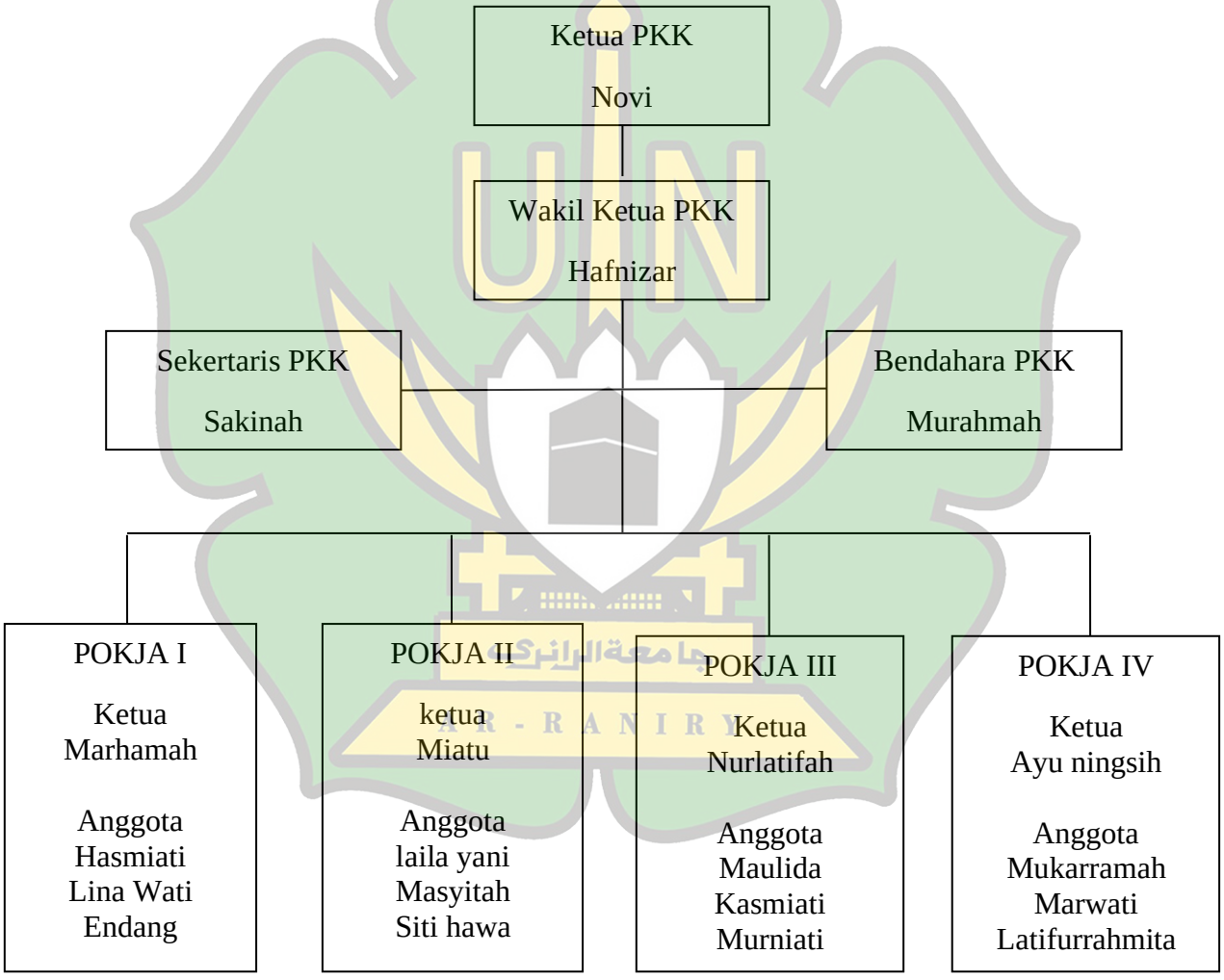

Sumber: Buku besar gampong Matang teungoh

Gambar 4.2 Struktur TP-PKK kota Lhoksukon

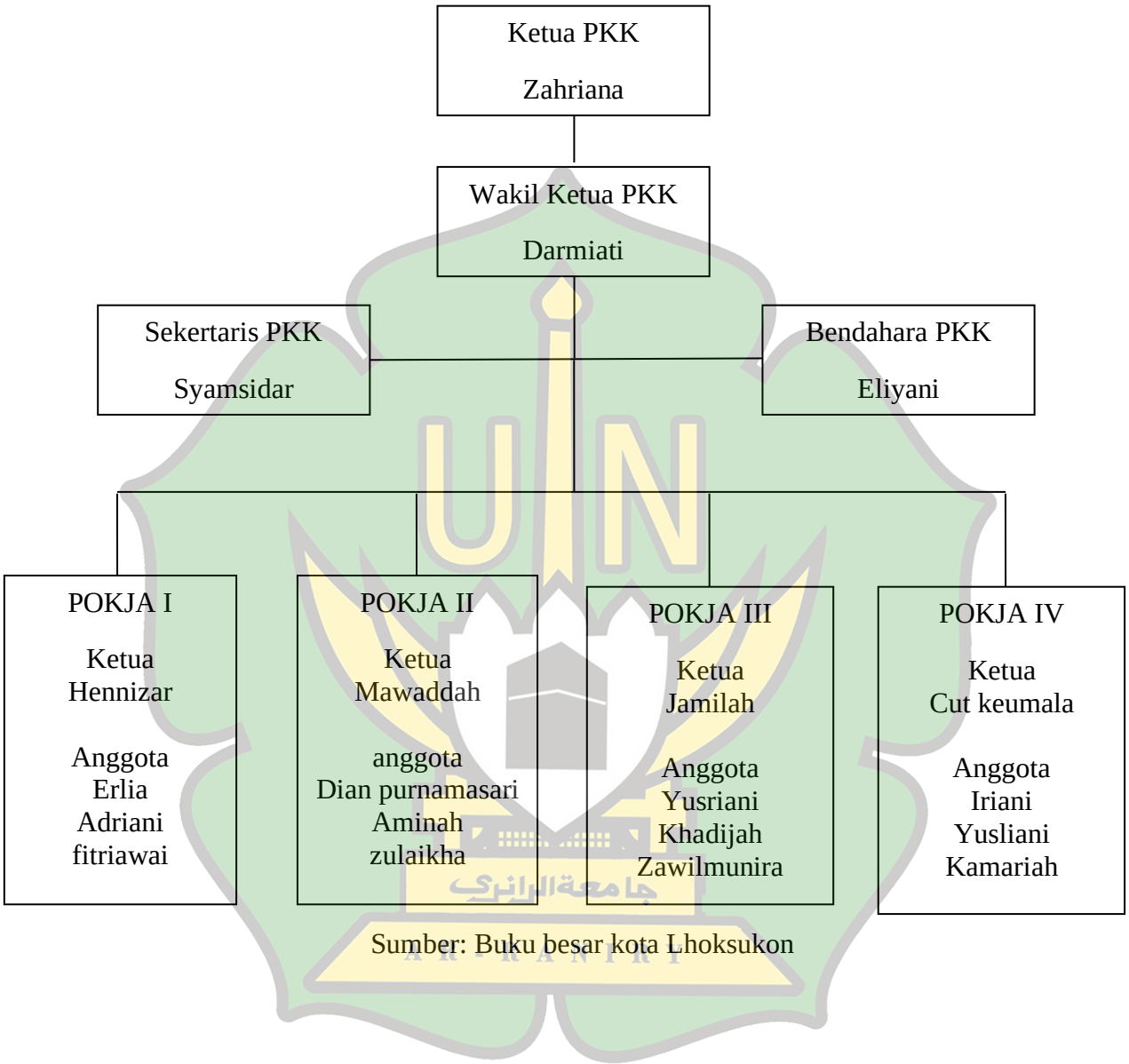

Sumber: Buku besar kota Lhoksukon

Gambar 4.3 Struktur TP-PKK gampong Asan LB

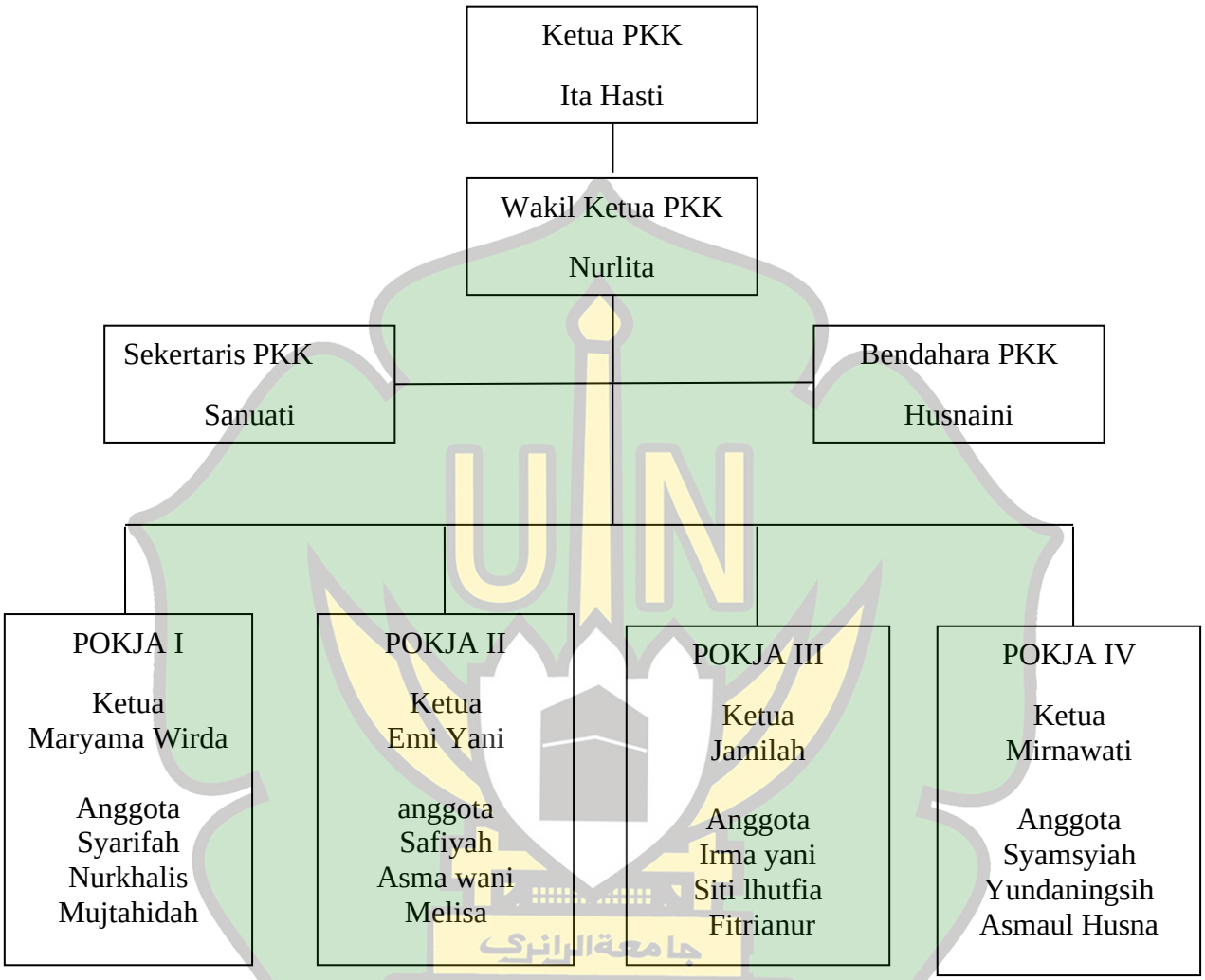

Sumber: Buku besar gampong Asan LB

C. Pola kerja ketua PKK dalam melakukan pembinaan keluarga sejahtera.

Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berpotensi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti di bidang perilaku keorganisasian. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan dan mengayomi anggotanya.[70]

Sebagaimana pola kerja yang harus ada disetiap organisasi maka seorang ketua berkewajiban untuk dapat selalu menerapkan pola kerja apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Informasi

   Berdasarkan konsep manajemen memiliki fungsi untuk merencanakan, menyusun, menempatkan, mengarahkan dan mengendalikan apakah rencana yang dibuat telah terealisasikan dengan baik, untuk menjalankannya maka manajemen membutuhkan informasi yang berkualitas dan harus selaras dan saling berkaitan dengan informasi-informasi lainnya yang ada dalam organisasi agar dapat menjalankan semua fungsi manajemen tersebut.

---

[70]Sulfiandi, Munif arfan dkk, *Peran Pemimpin dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*, (Makasar: 2019), hal 2

Sebelum membuat perencanaan program PKK maka ketua PKK harus mencari tahu terlebih dahulu apa saja informasi yang dibutuhkan dalam organisasi PKK baik itu untuk kader PKK dan untuk masyarakat. Sehingga ketua PKK akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada para kader PKK untuk

Hasil dari wawancara diatas diperkuat oleh jurnal Jayanti Tri oktavia menyatakan: ketua PKK sebagai pemimpin dapat mencari informasi di luar lingkungan dan sebagai pusat informasi bagi organisasinya. Peranan ini terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

a. Peranan sebagai *monitor*, peranan ini mengidentifikasi seorang pemimpin sebagai penerima dan pengumpul informasi, supaya pemimpin mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpinnya, dan mempunyai pemahaman yang komplit tentang lingkungannya.
b. Peranan sebagai disseminator, peranan ini melibatkan pemimpin untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
c. Peranan sebagai juru bicara (*spokesman*), peranan ini dimainkan pemimpin untuk menyampaikan informasi ke luar lingkungan organisasinya. Bedanya dengan *disseminator* ialah *spokesman* ini memberikan informasi ke luar lingkungan. Sebaliknya dengan *disseminator* memberikan informasi ke dalam lingkungan organisasi.[71]

[71] Jayanti Trioktavia dkk, *Peran Pemimpin dalam Mengembangkan Budaya Organisasi Studi Kasus pa Pt. Asuransi Jiwasraya (persero) Malang Regional Office,* (Malang: 2016), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 40 No.1, hal 151.

Informasi yang harus diberikan ketua PKK kepada masyarakat adalah berupa sosialisasi tentang pelaksanaan program PKK agar masyarakat mengerti program PKK dan apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan program PKK, untuk mengetahui hal tersebut dapat kita ketahui melalui hasil wawancara dengan masyarakat gampong Matang teungoh, Kota Lhoksukon dan Asan LB.

Pernyataan masyarakat gampong Matang teungoh Ibu NB menyatakan:

> *"Setahu saya tidak ada sosialisasi apapun yang diberikan baik itu dari pihak gampong maupun dari pihak kecamatan, karena selama ini memang tidak ada kegiatan apa-apa mengenai program PKK, kalau ada kegitan di gampong palingan kegiatan yang dilakukan dari pihak gampong bukan dari ibu-ibu PKK".*[72]

Pernyataan masyarakat kota Lhoksukon Ibu WY menyatakan:

> *"Alhamdulillah sosialisasi mengenai PKK di gampong kami sering dilakukan baik itu dari gamong sendiri maupun dari pihak kecamatan dan untuk sosialisasi yang diberikan itu beragam, ada yang tentang kewirausahaan, tentang kesehata dan lain-lain, apalagi kami para kader sering mendapatkan penyuluhan dari pihak puskesmas Lhoksukon untuk lebih mengerti dalam menjalankan posyandu".*[73]

Pernyataan masyarakat gampong Asan LB Ibu AS menyatakan:

> *"mengenai sosialisasi pernah diberikan tapi sangat jarang karena saya sendiri kurang tahu mengenai program-program PKK, yang saya tahu biasanya para kader yang sering mendapatkan sosialisasi tentang PKK, kalau kami masyarakat jarang diberikan sosialisasi".*[74]

Dari hasil wawancara di atas terkait dengan sosialisasi dapat peneliti simpulkan bahwa tidak semua gampong memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait program-program PKK, hanya masyarakat Kota Lhoksukon yang

---

[72]Hasil wawancara dengan Ibu NB masyarakat gampong Matang teungoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 21 Oktober 2021.

[73]Hasil wawancara dengan Ibu WY kader PKK kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 21 Oktober 2021.

[74] Hasil wawancara dengan Ibu AS masyarakat gampong Asan LB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 22 Oktober 2021.

mendapatkan sosialisasi tentang PKK secara merata seharusnya gampong lain juga dapat menjalankan hal sama dengan kota Lhoksukon. Karena jika para masyarakat gampong tidak mengerti tentang pelaksanaan program PKK maka program yang telah direncanakan tidak akan memiliki efek, karena masyarakat sendiri tidak mengerti maksud dan tujuan dari program PKK sehinga masyarakat tidak menerima hasil dari pelaksanaan program PKK.

Pernyataan ini diperkuat dengan jurnal Ramandita Shalfiah (2013), dimana Penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu. PKK sebagai penyuluh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai perkembangan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang juga mendukung program-program pemerintah Kecamatan Lhoksukon.[75]

2. Perencanaan dan Membuat keputusan

Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen, karena *orrganizing, staffing, directing dan controling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan dan situasi. Perencanaan diproses oleh perencana, hasilnya menjadi rencana

[75] Ramandita Shalfiah, *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang*, (jurnal Ilmu Pemerintah: 2013), volume 1, nomor 3, hal 982.

perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana.[76] Setiap ketua PKK melakukan perencanaan pelaksanaan program PKK dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan aparat gampong dan engan kader PKK karena setiap pelaksanaan program PKK akan melibatkan aparat gampong dan seluruh masyarakat, hal ini sesuai dengan pernyataan ketua PKK gampong Matang teungoh Ibu NV menyatakan:

"Setiap ada program PKK yang akan dilaksanakan maka saya dan kader PKK akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pak Geuchik dan sekretaris desa program apa saja yang dapat karena setiap program PKK yang diselenggarakan geuchik harus tahu".[77]

Pernyatan ketua PKK kota Lhoksukon Ibu ZR menyatakan:

"untuk perencanan program PKK tentu saja kami para tim penggerak PKK akan bermusyawarah dengan terlebih dahulu deggan aparat gampong setempat, apakah memungkinkan pelaksanaan program tersebut, apakah ada anggaran untuk program PKK dan lainnya, karena tanpa dukungan dari aparat gampong maka pelaksanaan program PKK juga tidak akan berjalan dengan lancar".[78]

Pernyataan Ibu IH ketua PKK gampong Asan LB menyatakan:

" karena saya baru menjabat sebagai ketua PKK dalam periode ini maka pertama-tama saya akan bertanya mengenai program PKK kepada sektrearis PKK karena sekretaris PKK tidak pernah diganti setelah menemukan perencanaan yang akan dilaksanakan baru saya akan membahas kembali dengan geuchik gampong untuk meminta pendapat, apakah memunginkan untuk pelaksanaan program tersebut atau tidak".[79]

Dari hasil pernyataan wawancara diatas disimpulkan bahwa semua ketua PKK akan melakukjan musyawarah terlebih dahulu dengan para kader dan

---

[76] H. Malayu SP Hasibuan, *Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal 91.

[77]Hasil wawancara dengan Ibu NV ketua PKK gampong Matang teungoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Oktober 2021.

[78]Hasil wawancara dengan Ibu ZR ketua PKK kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Oktober 2021.

[79] Hasil wawancara dengan Ibu IH ketua PKK gampong Asan LB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 18 Oktober 2021.

aparat gampong dalam melakukan perencanaan program PKK agar dapat membuat perencanaan yang matang dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan pernyataan ini sesuai dengan buku panduan pkk yang mana Perencanaan Program PKK pada hakikatnya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, mencakup:

a. Penyusunan perencanaan program dilakukan dari bawah, yang dimulai dari Kelompok Dasawisma sampai Tim Penggerak PKK Pusat dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masing-masing melalui MUSRENBANG di setiap jenjang.
b. Menggunakan basis data dan informasi yang bersumber dari pelaporan secara berjenjang, serta dari data Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK.
c. Dokumen hasil Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) juga dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mengukur tingkat keberhasilan program dan permasalahan yang dihadapi.[80]

3. Pelaksanaan program

Di setiap gampong memang berpegang pada satu buku panduan PKK dalam melakukan pelaksanaan program PKK gampong tapi dari hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui program apa saja yang telah dilakukan oleh para kader PKK, hasil wawancara dengan NB masyarakat gampong Matang teungoh menyatakan:

---

[80] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan Dan Kesejahteraan PKK*, (Jakarta : Tim Penggerak Pusat, 2010), hal II-18.

"*Saya tidak terlalu tahu mengenai program PKK, yang saya tahu program PKK yang ada di gampong saya hanya posyandu, terkait program-program lain yang berkaitan dengan PKK saya kurang tahu, karena memang selama ini tidak pernah ada kegiatan gampong yang diselenggarangan oleh PKK dan seingat saya dulu pernah di buat acara PKK ketika ibu Bupati datang, kami melakukan beberapa kegiatan seperti perlombaan pengetahuan PKK, lomba membuat kue. Acaranya hanya berlangsung satu hari setelah itu tidak pernah ada lagi kegiatan PKK".*[81]

Pernyatan Ibu WY masyarakat Kota Lhoksukon menyatakan:

"*Selama ini program PKK yang ada Lhoksukon berjalanan dengan baik, sering diadakan kegiatan mengenai PKK contohnya acara arisan, acara memasak dan acara lainnya, Cuma selama pandemi ini sudah berkurang dikarenakan covid-19 jadi banyak kegiatan yang di tunda, tapi untuk kegiatan posyandu, simpan pinjam, pengajian ibu-ibu,belajar mengaji untuk anak-anak tetap diselenggarakan. Sebelum pandemi juga sering diadakan pelatihan komputer untuk para remaja yang ada di sekitar kota Lhoksukon".*[82]

Pernyataan Ibu AS masyarakat gampong Asan LB menyatakan:

"Mengenai program PKK di gampong kami, yang saya tahu hanya ada program posyandu, dan simpan pinjam, untuk yang lain saya kurang tahu dan yang terbaru sekarang sudah adanya posyandu untuk lansia. Tapi sesekali di gampong kami ada diadakan pelatihan-pelatihan, seperti tahun kemarin ada orang dari kecamatan yang datang mengajarkan cara membuat sirih junjung dan itu cukup bermanfaat, karena ada sebagian warga yang dapat mengambil peluang tersebut untuk mulai membuka jasa pembuatan sirih junjung untuk acara pernikahan dan saya dengar katanya akan di adakan pelatihan menjahit tapi sampai sekarang belum terlaksana, mungkin belum ada dana saya juga kurang tahu".[83]

Dari pernyataan masyarakat gampong Matang teungoh, Kota Lhoksukon dan Asan LB di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua gampong menjalankan program yang sama walaupun berpegang dalam buku panduan PKK yang sama, seperti gampong Matang teungoh tidak terlalu aktif dalam menjalankan program

---

[81] Hasil wawancara dengan Ibu NB masyarakat gampong Matang teungoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 21 Oktober 2021.

[82] Hasil wawancara dengan Ibu WY kader PKK kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 21 Oktober 2021.

[83] Hasil wawancara dengan Ibu AS masyarakat gampong Asan LB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 22 Oktober 2021.

PKK, program PKK yang rutin dilaksanakan di gampong matang teungoh adalah program Posyandu. Program Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.[84] Biasanya kegiatan posyandu akan dilakukan satu bulan sekali yang akan di laksanaan di meunasah serta posyandu ini terdiri dari posyandu balita dan posyandu lansia.

Begitu juga dengan gampong Asan LB hanya menjalankan beberapa program PKK yaitu pokja II yang berupa pelatihan membuat sirih junjung, program simpan pinjam, program ini merupakan usaha ekonomi produktif dimana keluarga didorong mampu mencukupi kebutuhannya, bahkan mendapatkan penghasilan atau pendapatan tambahan melalui kegiatan kelompok dengan pemberian modal usaha yang menghasilkan barang atau jasa. kegiatan ini ditujukan kepada anggota PKK dan diprioritaskan kepada mereka yang kurang mampu dan minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan keluarga.[85] Program Pokja IV yang berupa program Posyandu balita dan posyandu lansia.

---

[84] Sulistyorini, *Posyandu dan Desa Siaga*, (Jogyakarta: 2010, Nuha Medika).

[85] Yesi Maonika Putri, "*Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi)*, (UIN Sultan syarif syarif Riua: 2017), hal 10.

Berbeda dengan gampong Matang teungoh dan gampong Asan LB, Kota Lhoksukon sudah lumayan aktif dalam menjalankan semua program PKK, di gampong Asan LB dan Kota Lhoksukon sudah menjalankan program Pokja I yang berupa pengajian khusus ibu-ibu, TPA yang akan dikelola oleh para kader PKK, program Pokja II berupa program simpan pinjam , Program pokja III berupa program tata boga, seperti mengadakan kegiatan membuat kue yang akan membantu masyarakat dalam megambangkjan ide usahanya. Program Pokja IV seperti posyandu balita dan posyandu lansia.

Seharusnya setiap gampong dapat mewujudkan semua program yang ada dalam PKK, apalagi PKK sudah hadir di gampong-gampong selama bertahun-tahun dan pemerintah selalu melakukan evaluasi mengenai program-program PKK agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Tapi dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa tidak semua gampong mampu mewujudkan program-program PKK, yang seharusnya setiap ketua dan kader PKK dapat mewujudkan hal tersebut karena tim PKK pusat sudah melakukan pembagian kelompok kerja yang akan memudahkan setiap kader dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini diperkuat dengan keputusan ketua PKK pusat menyatakan: Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, tim PKK pusat membuat kelompok kerja (pokja) yang akan mengefektifkan sasaran dan pencapaian Program Kerja PKK, dan dibagi menjadi empat kelompok kerja yaitu:

a. Program pokja I

Pokja I melaksanakan Pembinaan Karakter dalam kehidupan keluarga penuh cinta dan kasih sayang dengan menanamkan sikap perilaku berbudaya dan berkepribadian Indonesia. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari 10 Program Pokok PKK, yaitu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong.

b. Program pokja II

Pokja II Berperan serta dalam upaya peningkatan Pendidikan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam usaha memenuhi kebutuhan pendidikan dasar melalui wajib belajar 12 Tahun, dan pemberian keterampilan keluarga dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil, serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari 10 Program Pokok PKK, yaitu Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan berkoperasi

c. Program pokja III

Pokja III Mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan sumberdaya keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga dan diversifikasi pangan lokal, pemanfaatan sumberdaya alam, melalui teknologi tepat guna dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari 10 Program Pokok PKK, yaitu Pangan, Sandang, dan Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga.

d. Program pokja IV

Pokja IV mengelola Meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Hidup Bersih Sehat, mencegah dan menanggulangi penyakit menular dan tidak menular, berperanserta dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa), berpartisipasi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), melestarikan lingkungan hidup, Keluarga Berencana, dan perencanaan sehat. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari 10 Program Pokok PKK, yaitu Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.[86]

Secara keseluruhan untuk mengetahui pola kerja yang telah ketua PKK dalam melakukan pembinaan keluarga sejahtera dapat kita ketahui melalu wawancara dengan masyarakat gampong Matang teungoh, Kota Lhoksukon dan gampong Asan LB, pendapat salah satu masyarakat di kota Lhoksukon, Ibu WY mengatakan:

"menurut saya kepemimpinan ketua PKK yang sekarang sangat bagus beliau sangat ramah dengan masyarakat dan para kader, selalu turut hadir dalam semua kegiatan PKK. Menurut saya ketua PKK sangat bertanggung jawab serta tidak ada kabar miring mengenai ketua PKK yang sekarang, dari yang saya tahu ketua PKK sekarang sering membuat acara-acara untuk ibu-ibu PKK seperti acara memasak dan arisan ibu-ibu PKK agar terjalin komunikasi yang dengan masyarakat".[87]

Hasil wawancara dengan Ibu NB masyarakat gampong Matang teungoh menyatakan:

---

[86] Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan Dan Kesejahteraan PKK*, (Jakarta : Tim Penggerak Pusat,2010), hal II 20.

[87] Hasil wawancara dengan Ibu WY kader PKK kota Lhoksukon kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara tanggal 21 Oktober 2021.

"mengenai kinerja dan kepemimpinan ketua PKK menurut saya bagus-bagus saja, menurut saya ketua PKK sudah bekerja dengan baik karena ketua PKK dapat membangun hubungan kerja yang baik antar kader, akan tetapi ketua PKK terkadang sombong dan kurang ramah dengan kami masyarakat".[88]

Hasil wawancara dengan Ibu AS masyarakat gampong Asan LB menyatakan:

"mengenai kepemimpinan dan kinerja ketua PKK menurut saya tidak terlalu bagus, memang ketua PKK selalu hadir setiap penyelenggaran program PKK tetapi ketua yang sekarang lebih sering mementingkan anggota keluarganya dan kerabatnya ketika menjalankan tugas, seperti dalam pemeilihan kader PKK beliau lebih memilih sanak keluarganya dari pada masyarakat yang memang mampu dalam menjalankan pelaksanaan tugasnya. Dan terkadang Ketua PKK hanya mendengarkan pendapat orang-orang tertentu saja, yaitu orang yang dekat dengan ketua PKK saja. Menurut saya itu kurang baik karena dapat menimbulkan prasangka buruk dan ketika ada kader yang menurut masyarakat tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan melapor masalah tersebut kepada ibu geuchik agar dapat ditindaklanjuti tapi karena kader tersebut orang yang dengan ibu geuchik jadi kader tersebut tidak di tegur dan dibiarkan melakukan tugas sesuka hatinya, seperti dalam pengelolaan pelaminan gampong perjanjiannya pemasangan pelaminan dilakukan oleh para remaja perempuan yang ada di gampong secara bergilir tapi para kader yang menjabat tidak melakukan hal tersebut, hanya mereka yang selalu melakukan pemasangan pelaminan yang padahal kalau hal itu diberlakukan secara merata akan membantu banyak orang karena setiap pemasangan pelaminan akan diberikan upah yang lumayan sehingga tidak satu dua orang saja yang terbantu tapi banyak pihak yang terbantu".[89]

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan, berdasarkan sampel yang diambil, hanya kota Lhoksukon yang ketua PKKnya sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, mulai dari para kader sampai masyarakat kota Lhoksukon merasa puas dengan kinerja dan kepemimpinan ketua PKK kota Lhoksukon. Serta ketua PKK kota Lhoksukon sudah dapat membangun hubungan yang baik dengan para kader dan masyarakat

---

[88] Hasil wawancara dengan ibu NB masyarakat gampong Matang teungoh kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara tanggal 21 Oktober 2021.

[89] Hasil wawancara dengan Ibu ASh masyarakat gampong Asan LB kecamatan Lhoksukon kabuapten Aceh Utara tanggal 22 Oktober 2021.

sehingga program yang dijalankan akan lebih mudah terlaksana dan dapat mencapai target yang diinginkan.

Berbeda dengan kota Lhoksukon, ketua PKK gampong Matang teungoh dan gampong Asan LB belum sepenuhnya dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik, walaupun masyarakat merasa ketua PKK sudah dapat menjalan tugasnya mengenai pelaksanaan program tapi ketua PKK dari kedua gampong ini belum bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, ketika seorang pemimpin belum bisa membanagun hubungan yang baik dengan target yang dituju maka pemimpin tersebut dinilai belum berhasil dalam menjalankan tugasnya. Karena yang menjadi sasaran dari program PKK adalah para masyarakat, jika masyarakat merasa tidak senang dengan kinerja Ketua PKK maka masyarakat akan malas dalam mengikuti program PKK yang dijalankan.

4. Pengawasan

Setiap organisasi akan melakukan pengawasan terhadap program yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan sesuai dengan target atau mengalami kendala dalam proses pelaksanaanya. Untuk mengetahui apakah setiap ketua PKK melakukan pengawasan terhadap program kerja yang dilaksanakan atau tidak, dapat kita ketahui melalui hasil wawancara dengan ketua PKK gampong Matang teungoh Ibu NB menyatakan:

"selama ini tidak ada pengawasan khusus terkait pelaksanaan program PKK, saya menyerahkan semua tugasnya kepada para kader, jadi para kadernya sendiri yang akan meninjau kembali jika ada masalah. kalau ada masalah yang

sudah tidak dapat ditangani oleh para kaer baru dilaporkan ke saya, dan juga tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan".[90]

Pernyataan Ibu ZR ketua PKK Kota Lhoksukon menyatakan:

"di tempat kami selalu ada pengawasan, bahkan pengawasannya dilakukan langsung oleh orang kecamatan dan itu rutin dilakukan walaupun tidak setiap bulan dan saya sebagai ketua PKK juga melakukan pengawasan terkait program-program kami".[91]

Terkait pengawasan program PKK, ketua PKK gampong Asan LB Ibu IH menyatakan:

"kalau pengawasan program-program PKK saya sendiri selalu melakukan pengawasan dan selalu mengevaluasi lebih lanjut terkait program-program yang dijalankan, apakah ada perkembangan atau tidak. Untuk pihak kecamatan juga ada pengawasan yang dilakukan tapi jarang dan biasanya kami pihak PKK melakukan pengawasan di akhir tahun".[92]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan tidak semua ketua PKK melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap program yang telah direncanakan dan dilaksanakan, yang melakukan pengawasan secara menyeluruh hanyalah Kota Lhoksukon, hal ini dikarenakan kota Lhoksukon adalah ibu kota Kecamatan Lhoksukon sehingga mendapatkan perhatian lebih dari pihak PKK kecematan. Seharusnya baik pihak Kecamatan atau pihak gampong dapat melakukan pengawasan secara teratur untuk proses pelaksanaan program PKK, karena jika ketua PKK tidak melakukan pengawasan maka tidak akan diketahui apakah sebuah program berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak dan hal ini akan menyebabkan proses pelaksanaan program akan berjalan ditempat.

---

[90] Hasil wawancara dengan Ibu NV ketua PKK gampong Matang teungoh kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Oktober 2021.

[91] Hasil wawancara dengan Ibu ZR ketua PKK kota Lhoksukon kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Oktober 2021.

[92] Hasil wawancara dengan Ibu IH ketua PKK kota Lhoksukon kecamatan Lhoksukon kabuapten Aceh Utara tanggal 18 Oktober 2021.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penepatan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif, serta fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi.[93]

D. Peluang dan hambatan PKK dalam meningkatkan pembinaan keluarga sejahtera

Dalam menyusun program-programnya, PKK mengacu pada program Rakernas VII yang merupakan program serentak nasional sebagai panduan dalam melaksanakan program PKK di seluruh Indonesia. Dengan adanya pedoman tersebut maka keberhasilan program akan mudah diketahui. Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab Dalam mengemban tugasnya, Tim Penggerak PKK merupakan SDM yang memiliki fungsi ganda yakni sebagai pegawai dan sebagai kader PKK karena kebanyakan Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan sebagian besar dari kalangan PNS. Meski memiliki peran ganda, tanggung jawab yang dimiliki sangat besar dalam membantu pemerintah dalam pembangunan. Adanya Bantuan Dana dari Pemerintah Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung program kerja PKK yakni adanya bantuan dana

[93] Iswandir, *Dasar-Dasar proses pengawasan dalam Organisasi*, hal 68.

dari pemerintah yang berasal dari APBD, APBDes, Dana PUG, dan bantuan modal kerja.[94]

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat kita ketahui peluang apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan PKK di kecamatan Lhoksukon melalui hasil wawancara dengan ketua PKK gampong Matang teungoh, Ibu NV menyatakan:

"dalam pelaksanaan program PKK antusias masyarakat menjadi peluang yang sangat besar untuk mensukseskan program-program PKK, dan ketersediaan material dan bahan untuk membuat program pkk,begitu juga dengan dukungan para aparat gampong juga mempunyai pengaruh besar untuk mensuksekan pelaksanaan program PKK apalagi banyaknya para kader yang siap bekerja untuk mensukseskan PKK".[95]

Hasil wawancara dengan ketua PKK kota Lhoksukon, Ibu ZR menyatakan:

"peluang yang terdapat dalam pelaksanaan PKK di gampong kami adanya sumber daya manusia yang berupa kader PKK yang memang sesuai dengan kemampuannya dalam setiap bidang sehingga para kader dapat menjalankan tugas sesuai arahan, adanya dukungan dari petinggi gampong juga menjadi peluang yang besar untuk kesuksesan PKK jika petinggi gampong setuju dengan program PKK yang dilaksanakan maka dana yang diperlukan untuk PKK akan semakin mudah dicairkan, adanya peralatan yang dibutuhkan ketika pelaksanaan kegiatan PKK serta antusias masyarakat dalam mengikuti program PKK".[96]

Hasil wawancara dengan ketua PKK gampong Asan LB, Ibu IH menyatakan:

"peluang yang ada dalam PKK adalah adanya dukungan dari geuchik, tuha peut, tuha lapa,tengku imum dan pejabat gampong lainnya dalam mensukseskan pelaksanaan PKK, hubungan yang baik antar ketua PKK dan kader PKK agar terjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dalam menyelenggarakan program PKK karena jika hubungan ketua dan bawahan tidak

---

[94]Nina Rosa Riana dkk, *Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan (Studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang)*, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 5, hal 855.

[95]Hasil wawancara dengan Ibu NV ketua PKK gampong Matang teungoh kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Oktober 2021.

[96] Hasil wawancara dengan Ibu ZR ketua PKK kota Lhoksukon kecamatan Lhoksukon kabupten Aceh Utara tanggal 16 Oktober 2021.

baik itu akan menggangu proses pelaksanaan program PKK serta banyaknya masyarakat yang mendukung program PKK karena sasaran utama PKK mensejahterakan kehidupan masyarakat".[97]

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa rata-rata setiap gampong sudah dapat memanfaatkan peluang yang ada di setiap gampong masing-masing dalam mensukseskan pelaksanaan program PKK walaupun tidak semua gampong memiliki peluang yang sama.

Tidak hanya peluang yang terdapat dalam pelaksanaan program PKK di Kecamatan Lhoksukon,tetapi dalam pelaksanaan juga terdapat hambatan yang berupa tidak adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan melakukan pelaksanaan program PKK, yang dimana sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program PKK karena jika tidak ada sarana dan prasarana maka program yang ingin disampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik serta akan mempengaruhi keberhasilan PKK. kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program, kurangnya sumber daya manusia yang mampu di bidangnya juga merupakan sebuah hambatan. Dan hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua PKK di gampong Matang teungoh, Ibu NV menyatakan:

"hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program PKK adalah kurangnya anggaran sehingga ketika kami para anggota PKK ingin membuat acara atau kegiatan lain yang berkaitan dengan PKK harus terhambat karena permasalahan dana, karena dana untuk penyelenggaran PKK itu dari anggaran gampong, tapi gampong tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program PKK. Dan kadang yang menjadi penghambat adalah kadernya sendiri, banyak kader yang kurang mengerti tentang PKK, jadi kalau ada hal yang perlu

[97] Hasil wawancara dengan Ibu IH ketua PKK kota Lhoksukon kecamatan Lhoksukon kabupapten Aceh Utara tanggal 18 Oktober 2021.

diselesaikan harus diajarkan dulu, apalagi yang menjadi kader adalah para ibu rumah tangga dan setiap kader juga mempunyai kesibukan masing-masing".[98]

Hasil wawancara dengan ketua PKK kota Lhoksukon Ibu ZR menyatakan:

"untuk kendala yang terdapat dalam pelaksanaan program PKK kadang-kadang ada masyarakat yang tidak mau membayar uang simpan pinjam sehingga hal itu juga akan mempengaruhi ke masyarakat yang lain juga karena jika banyak masyarakat yang tidak mau bayar nanti orang pihak simpan pinjam tidak akan memberikan pinjaman lagi, dan untuk sekarang hambatannya karena corona jadi banyak kegiatan yang di tunda dan tidak bisa diselenggarakan, apalagi pas kasus virus corona parah masyarakat dituntut untuk selalu menjaga jarak dan memakai masker sehingga banyak masyarakat gampong yang malas keluar rumah".[99]

Hasil wawancara dengan ketua PKK gampong Asan LB Ibu IH menyatakan:

"kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan program PKK adalah kurangnya anggaran desa dalam pelaksanaan program PKK sehingga ketika PKK ingin membuat inovasi baru itu akan terhambat karena tidak ada dana, karena kurangnya dana jadi tidak bisa membeli alat dan bahan untuk pelaksanaan PKK, contohnya ketika kami anggota PKK ingin membuat pelatihan menjahit tidak ada mesin jahit walaupun ada tempat untuk pelaksanaan program tapi tidak ada bahan sama saja tidak dapat dijalankan programnya, dana gampong di gunakan untuk keperluan gampong lainnya yang lebih mendesak, karena dikampung kami belum ada dana khusus untuk PKK. Dan kendala lainnya kadang ada hubungan para kader yang kurang baik antar sama lain sehingga menjadi perang dingin dengan antar kader tapi masalah ini dapat diatasi dengan cara musyawarah".[100]

Sesuai dengan pernyataan informan diatas diperkuat dengan jurnal Nina Rosa Riana menyatakan: terdapat faktor penghambat pelaksanaan PKK salah satunya:

---

[98]Hasil wawancara dengan Ibu NV ketua PKK gampong Matang teungoh kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Oktober 2021.

[99] Hasil wawancara dengan Ibu ZR ketua PKK kota Lhoksukon kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Oktober 2021.

[100] Hasil wawancara dengan Ibu IH ketua PKK kota Lhoksukon kecamatan Lhoksukon kabuapten Aceh Utara tanggal 18 Oktober 2021.

1. Semakin berkurangnya tenaga sukarela/kader PKK di desa-desa.

Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Sebagaimana keadaan di desa, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tidak banyak dari mereka yang mau memikirkan sumbangsihnya untuk kemajuan pembangunan di desanya. Mereka tidak mau ribet dengan membuat laporan-laporan terlebih jika mereka belum dijelaskan terlebih dahulu dan masih asing dengan teknologi.

2. Terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat pendidikan kader.

Tingkat pendidikan sesorang kurang lebihnya sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam hal ini kader di Desa berbeda dengan kader di Kecamatan, kader di desa sebagian besar hanya ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya membantu suami mencari nafkah. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan PKK khususnya bidang administrasi, karena salah satu kunci keberhasilan adalah melalui kegiatan tertib administrasi, termasuk pencatatan, data yang akurat dan pelaporan berjenjang, sehingga menjadi pola dasar kebijakan dalam penyusunan program kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran.

3. Kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun di desa-desa

Dewan penyantun TP PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK dalam hal ini dewan penyantun di desa adalah Kepala Desa. Dewan Penyantun bisa saja menjadi faktor penghambat manakala program yang dijalankan tidak mendapat dukungan dari Kepala Desa.

4. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan PKK

Anggaran merupakan salah satu pendukung pelaksanaan program PKK, suatu program akan terhambat jika tidak mendapatkan dana untuk pelaksanaan programnya walaupun mendapatkan dukungan penuh dari para stakeholder desa tapi tidak mempunyai anggaran juga akan mempengruhi keberhasilan program PKK.[101]

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa setiap desa memiliki hambatan dan permasalahan yang berbeda, yang menjadi permasalahan dominan disini adalah kurangnya dana untuk pelaksanaan program PKK dimana anggaran salah satu hal yang angat penting, karena jika tidak ada dana yang cukup untuk pelaksanaan program PKK maka kegiatannya akan tertunda atau bahkan tidak akan berhasil dan yang menjadi masalah lainnya dalam setiap gampong adalah kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya sehingga membuat pelaksanaan program PKK menjadi lambat. Seharusnya para kader yang menjabat dapat dipilih orang-orang yang mempunyai kamampuan dasar dalam bidangnya contohnya untuk kader posyandu dipilih salah satu masyarakat yang mengerti di bidang kesehatan seperti masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan di dunia kesehatan dan untuk urusan administrasi dipilih masyarakat yang mengerti tentang administrasi sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan program PKK.

---

[101] Nina Rosa Riana dkk, *Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan (Studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang)*, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 5, hal 855.

Hal lainnya yang membuat terhambatnya pelaksanaan PKK adalah konflik yang ada di dalam PKK contohnya konflik antar kader, jika sesama kader memiliki konflik maka ketika pelaksanaan program akan terjadi kendala seperti ada kader yang tidak ingin bekerja karena bermasalah dengan kader yang lainnya sehingga anggota PKK akan kekurangan orang dalam pelaksanaan program PKK. Setelah saya melakukan observasi di kecamatan Lhoksukon saya mendapati ada beberapa desa yang menjadi kader PKK kebanyakannya ibu rumah tangga yang memiliki balita juga sehingga di tengah-tengah pelaksanaan PKK harus meninggalkan tempat karena harus menenangkan anaknya yang menangis atau rewel, karena hal itu pekerjaan dari kader tersebut akan terhambat karena tidak ada lagi petugas yang bekerja, biasanya hal ini terjadi dalam pelaksanaan posyandu balita dan hal ini membuat data kembangan tumbuh anak menjadi tidak sesuai karena di posyandu terdapat empat meja pencatatan data anak jadi jika salah satu meja pencatatan kosong maka data kembang tumbuh anak akan bermasalah.

Melalui observasi yang saya lakukan saya juga mendapati permasalahan lain terkait dengan pelaksanaan posyandu balita yaitu kurangnya orang dalam pelaksanaan posyandu sehingga ketika penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi anak dilakukan sendiri oleh masyarakat yang memiliki balita dan ibu-ibu sering salah dalam melakukan hal ini sehingga ketika dimasukan dalam data kadang-kadang balita tidak memiliki penambahan tinggi badan atau malahan menjadi lebih berkurang tingginya. Seperti salah satu kasus seorang ibu yang ada di gampong Asan LB ibu tersebut diberitahukan oleh posyandu bahwa

anaknya mengalami masalah kurang gizi, karena merasa gizi anaknya sudah cukup dan seimbang jadi ibu tersebut mengecek ulang di puskesmas Lhoksukon dan hasilnya anak ibu tersebut tidak mengalami kurang gizi dan tidak memiliki permasalahan lainnya terkait kesehatannya. Jadi masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan program PKK terutama masalah tenaga kerja dan diharapkan melalui penelitian ini kedepannya masalah-masalah yang seperti peneliti sebutkan diatas dapat diatasi sehingga pelaksanaan program PKK dapat berjalan dengan sukses.

Dari hasil penelitian diatas dapat peniliti simpulkan secara ringkas dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Ringkasan kesimpulan penelitian

No	Nama Gampong	Hasil Penelitian
1.	Matang teungoh	Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PKK yang telah dilaksanakan oleh ketua PKK dan kader PKK di gampong Matang teungoh belum berjalan dengan sempurna karena masih banyak program PKK yang belum terlaksana dengan baik dan ketua PKK gampong Matang teungoh masih harus belajar banyak dalam memimpin sebuah organisasi agar dapat menerapkan pola kerja profesional, diharapkan ketua PKK Matang teungi dapat membangun komunikasi yang baik dengan para kader dan lebih sering mendengarkan pendapat masyarakat sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan. Terlepas dari persoalan yang terdapat pada kepemimpinan ketua PKK gampong Matang teungoh, hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program PKK kurangnya anggaran dalam menjalankan program PKK, dan kurangnya kemampuan para kader dalam menjalankan program PKK.
2.	Kota Lhoksukon	Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari hasil obsevasi dan wawancara di kota Lhoksukon dapat

		dihasilkan bahwa pelaksanaan program PKK di kota Lhoksukon sudah berjalan dengan baik karena banyak program PKK yang telah terlaksana sesuai dengan target, faktor yang mendukung kesuksesan pelaksanaan program PKK karena kota Lhoksukon merupakan ibu kota Kecamatan Lhoksukon sehingga pihak kecamatan memberikan perhatian yang lebih banyak dalam proses pelaksanaannya. Dan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program PKK di kota Lhoksukon adalah adanya masyarakat yang tidak mau membayar uang simpan pinjam.
3.	Asan LB	Hasil penelitian dari gampong Asan LB menunjukkan bahwa gampong Asan LB belum dapat mewujudkan pelaksanaan program PKK secara sempurna kaerena masih banyak terdapat kendalam dalam pelaksanaannya seperti:kurangnya kemampuan ketua PKK dalam menjalankan pola kerja profesional sehingga ada program yang tidak berjalan sesuai dengan target, kurangnya kemampuan membangun komunikasi ketua PKK dengan masyarakat, masih adanya sifat nepotisme dalam menjalankan tugasnya, kurangnya anggran dalam pelaksaan program, tidak ada bahan dan alat dalam proses pelaksanaan program PKK serta kurangnya para kader yang menguasi bidangnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketua PKK memiliki pengaruh besar dalam melakukan pembinaan keluarga sejahtera, sehingga jika kinerja ketua PKK tidak bagus, maka akan berdampak terhadap pelaksanaan program PKK dan kinerja para kader PKK. Dan hal ini mengaruskan ketua PKK untuk dapat membangun komunikasi yang baik dalam para kader dan masyarakat, dapat melakukan perencanaan kerja, dapat menjalankan program kerja yang telah direncanakan, membangun motivasi kerja dan melakukan pengawaan terhadap program yang dijalankan. Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa tidak semua Ketua PKK di wilayah Kecamatan Lhoksukon dapat mewujudkan pelaksanaan program PKK, permasalan yang terdapat dalam melakukan pembinaan keluarga sejahtera adalah:
   a. Ketua PKK belum dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.
   b. Ketua PKK belum dapat memilih kader PKK yang dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya.
   c. Ketua PKK tidak melakukan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan.
   d. Ketua PKK tidak memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan program PKK.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

e. Ketua PKK hanya mendengarkan pendapat kader PKK tertentu.

2. Setiap gampong di kecamatan Lhoksukon memiliki peluang dan hambatan yang berbeda dalam melakukan pelaksanaan programnya dan rata-ratanya yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PKK adalah:

Faktor peluang dan hambatan yang ada di setiap desa:

a. Peluang yang terdapat dalam pelaksanaan program PKK adalah:
   1) Adanya dukungan dari para aparat gampong.
   2) Antusias dan dukungan masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan program PKK.
   3) Ketersediaan tempat dalam pelaksanaan program PKK.

b. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program PKK adalah:
   1) Adanya covid-19 yang memuat banyaknya aktivitas yang harus terhenti.
   2) Adanya beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelunasan uang simpan pinjam.
   3) Tidak ada alat dan bahan dalam pelaksanaan program PKK.
   4) Kurangnya tenaga kerja kader PKK yang menguasai bidangnya.
   5) Adanya perselisihan diantara para kader.
   6) Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program PKK.

B. Saran-saran

1. Diharapkan ketua PKK dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pelaksanaan program PKK sehingga dapat mewujudkan program PKK yang sesuai dengan target.

2. Diharapkan ketua PKK dapat memilih para kader yang mempunyai kemampuan yang sesuai di bidangnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Diharapkan pihak PKK Kecamatan Lhoksukon untuk lebih sering melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan program PKK dan melakukan pengawasan yang merata untuk setiap gampong.
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan program PKK agar para ketua PKK di setiap gampong dapat melakukan inovasi baru tanpa keterbatasan anggaran.
5. Penulis mengharapkan agar adik-adik leting dibawah saya melakukan penelitian tentang PKK kembali dengan judul "Pengaruh Dana Simpan Pinjam Desa Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Matang ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A Partanto, Pius, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.

Abdurrahman dan Fatoni., *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skrip*si. Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.

Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Arita, Setyowati, Arita, *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008.

B., I. L Pasaribu, Simanjuntak, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito, 1990.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara. *Kecamatam Lhoksukon dalam Angka*. BPS Kabupaten Aceh Utara 2021.

Badriyah, Mila. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pustaka setia bandung: 2008.
BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK*, Jakarta, 2019.

Chniago, Aspizain. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dudung, Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.

Faturocman, Agus Diyanto, *Validitas dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera*, 1996,Vol 1 No 9.

Friedman, M. Marilyn, *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*. Jakarta: EGC, 1998.

Hasian, Malayu. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hil Long, Thomas, *Collins English Dictonary*, London, 1979.

LAN RI, *Modul Diklat Substansi Diklat Pim IV*, Jakarta, 2004.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.

Malayu SP Hasibuan, *Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanimus, 1980.

Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Nina Rosa Riana dkk, Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Kelurga (PKK) dalam pemberdayaan perempun (Studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang), Malang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No 5.

Pabundu Tika, Moh, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Puspita, Dini dkk, Klasifkasi tingkat keluarga sejahtera dengan menggunakan metode regresi logistik ordinal dan fuzzy K-Nearest Neigbor (studi kasus kabupaten tamanggung tahun 2013), *jurnal guassian*, 2014, Volume 3, Nomor 4.

R.Terry, George. *Princiles of Management*, Edisi ke-6, Richard D.Irwin Homewood, Illionis,1972.

Ramandita Shalfiah, Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang, *jurnal Ilmu Pemerintah:* 2013, volume 1, nomor 3.

Rosalina, Iga. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 2012,Vol. 01 No 01.

Rosyid, Abdul, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Pola Kerja Terhadap Kinerja pegawai Tata Usaha SMPN di Kecamatan Kalideras Kota Administrasi Jakjarta Barat, *Jurnal Manajemen Pendidikan.*

Subagyo, P Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori Praktek*. Cet Ke:IV Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Memahami Penelitia*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.

Sujarweni, V Wiratna. *Metodologi Penelitian*.

Sulfiandi, Munif Arfan dkk, *Peran Pemimpin dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*,Makasar: 2019.

Sulistyorini, *Posyandu dan Desa Siaga*, Jogyakarta: Nuha Medika, Nuha Medika, 2010.

Supardi. *Metodologi Penelian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Tim Penggerak PKK Pusat. *Pemberdayaan dan Kesejahteraan PKK*. Jakarta: Tim Penggerak Pusat, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

trioktavia, Jayanti dkk, *Peran Pemimpin dalam Mengembangkan Budaya Organisasi (Studi Kasus pa Pt. Asuransi Jiwasraya (persero) Malang Regional Office),* Malang:, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 2016, Vol. 40 No.1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009.

Widyastuti, Astrina. (*Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 20s09*, 2012 Vol 1 No 1.

Ya'qub,Hamzah. *Menuju Keberhasilan Manajemen dan Kepemimpinan*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Yesi Maonika Putri, "*Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi),* UIN Sulan syarif Kasim Riua, 2017.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN

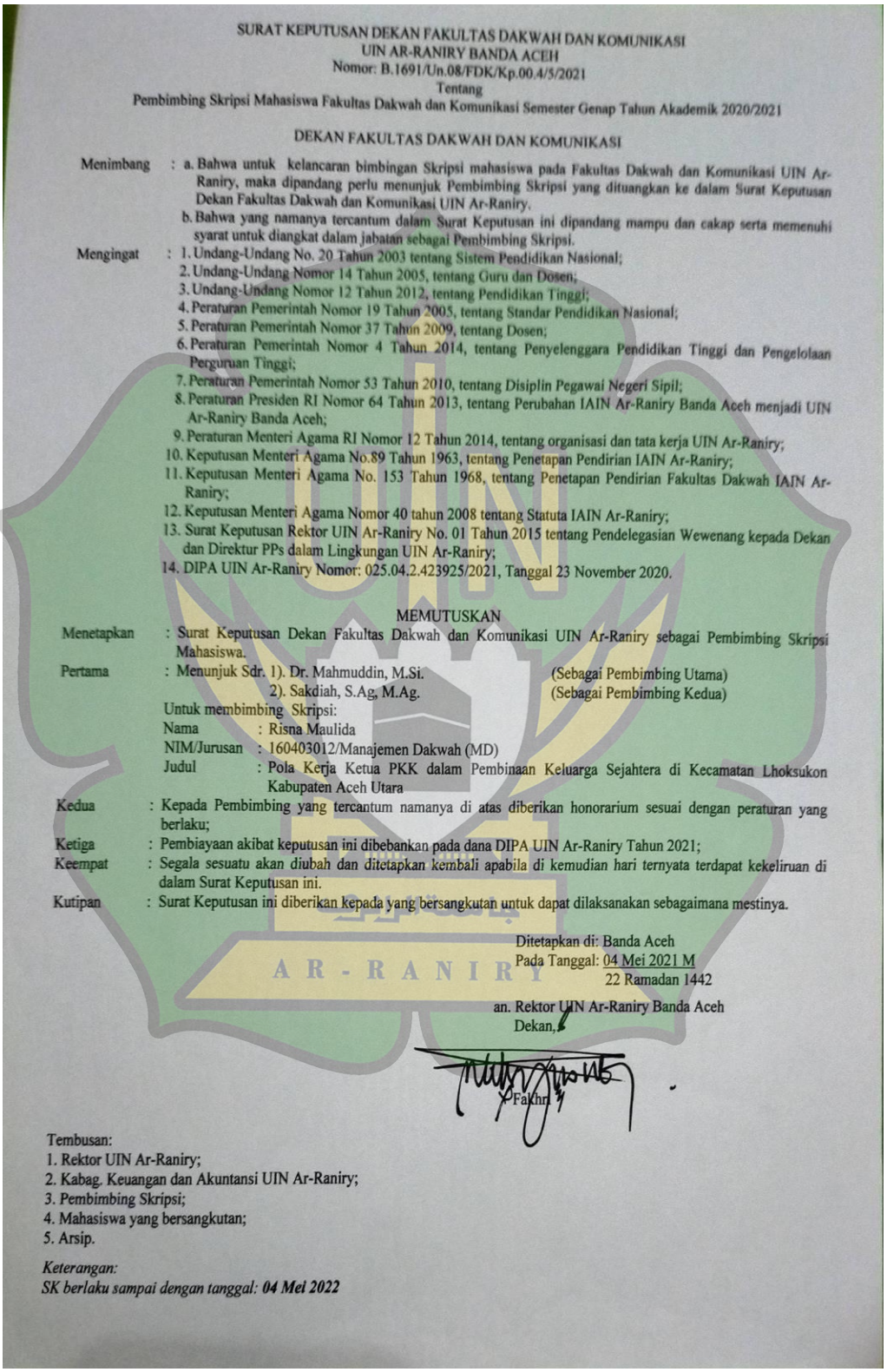

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1691/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2021
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Sakdiah, S.Ag, M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Risna Maulida
NIM/Jurusan : 160403012/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Pola Kerja Ketua PKK dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 04 Mei 2021 M
22 Ramadan 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: ***04 Mei 2022***

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B.4204/Un.08/FDK-I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Ibu Geuchik Gampong Asan LB
2. ibu Geuchik Gampong Matang Teungoh AB
3. ibu Geuchik kota lhoksukon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RISNA MAULIDA / 160403012**
Semester/Jurusan : XI / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Jalan perada utama lorong durian barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pola kerja ketua PKK dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Desember 2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pedoman wawancara

NO	Pertanyaan wawancara	Variabel	Informan
1	Apa yang menjadikan PKK sebagai pendorong kesejahteraan warga?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
2	Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaa program PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
3	Jika terdapat hambatan bagaimana cara anda mengatasi hambatan tersebut ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
4	Apakah ada program rutin yang di selenggarakan oleh PKK?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
5	Apakah ada program khusus terkait keluarga sejahtera ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
6	Apakah para kader aktif dalam setiap pelaksanaan program PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
7	Bagaimana dukugan stakeholder terhadap program kesejahteraan keluarga ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
8	Bagaimana pemantauan dan pengawasan pogram PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
9	Apakah ada sosialisasi program PKK yang dilakukan dalam pembinaan keluarga sejahtera ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
10	Bagaimana hubungan komunikasi dan interaksi yang terjalin antar kader PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
11	Bagaimana upaya anda dalam memecahkan masalah di dalam organisasi PKK, baik permasalahan di dalam program kerja maupun anggota PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
12	Inovasi apa saja yang anda buat selama menjadi ketua PKK dalam meningkatkan	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK

	program PKK ?		
13	Apa saja peluang yang terdapat dalam pelaksanaan pogram PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
14	Bagimana respon masyarakat terhadap program pembinaan keluarga sejahtera ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
15	Untuk kedepannya apa yang akan PKK lakukan agar warga bisa lebih menjadi sejahtera ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Ketua PKK
16	Bagaimana jalinan komunikasi antar ketua PKK dengan para kader ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
17	Menurut anda bagaimana sikap kepememimpinan ketua PKK dalam memecahkan masalah ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
18	Bagaimana cara ketua PKK dalam melaksanakan program-program kerjanya ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
19	Menurut anda kepemimpinan yang baik itu seperti apa ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
20	Inovasi apa yang ketua PKK pernah buat selama beliau menjadi ketua PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
21	Apakah ketua PKK sudah menciptakan suasana kerjasama dan pertisipasi yang aktif antar kader ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
22	Apakah ketua PKK turut andil dalam kegiatan-kegiatan PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
23	Apakah ketua PKK pernah atau sering mengadakan pembinaan untuk para kader PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
24	Bagaimana hubungan komunikasi dan interaksi yang terjalin antar kader PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
25	Apakah terdapat kendala dalam berkomunikasi dengan ketua PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK

26	Apakah ketua PKK pernah melakukan nepotisme dalam organisasi PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Kader PKK
27	Apakah anda tertarik dengan program-program yang di laksanakan oleh para kader PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
28	Apakah anda merasa program-program PKK yang telah di laksanakan sudah dapat mewujudkan keluarga sejahtera ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
28	Apakah anda merasakan efek dari program-program yag telah di lakukan oleh para kader PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
30	Apakah ada hal yag membuat anda kurag tertarik dalam mengikuti program PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
31	Apakah anda merasa terdapat nepotisme dalam pelaksanaan progran PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
32	Apakah selama ini ada sosialisasi tentang progam-program PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
33	Bagaimana kinerja ketua PKK dan kader, apakah memuaskan ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
34	Apaka ada program rutin yang dilakukan oleh para kader PKK?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
35	Menurut anda bagaimana sikap kepemimpinan ketua PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
36	Menurut anda bagaimana sikap ketua PKK dan kader dalam menjalankan tugasnya ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
37	Apakah anda sebagai masyarakat mendukung program-program PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
38	Apakah ketua PKK turut andil dalam melaksanakan program PKK ?	Pola kerja ketua PKK dalam pembinaan keluarga sejahtera	Masyarakat
39	Apa saja masukan untuk	Pola kerja ketua PKK	Masyarakat

	katua dan kader PKK ?	dalam pembinaan keluarga sejahtera	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Daftar Identitas Informan

No	Nama	Alamat	Usia	Pekerjaan	Pendidikan terakhir
1.	Novi	Matang teungoh	40 Tahun	IRT	SMA
2.	Hasmiati	Matang teungoh	38 Tahun	IRT	SMA
3.	Nur baiti	Matang teungoh	34 Tahun	IRT	SMA
4.	Zahriana	Kota Lhoksukon	37 Tahun	Guru SD	S-1
5.	Yusliani	Kota Lhoksukon	36 Tahun	Guru Tk	S-1
6.	Weli yani	Kota Lhoksukon	31 Tahun	Karyawan kantor KUA	S-1
7.	Ita hasti	Asan LB	42 Tahun	IRT	SMA
8.	Sanuati	Asan LB	51 Tahun	PNS	S-1
9.	Aisyah	Asan LB	40 Tahun	Penjahit	SMA

Daftar gambar wawancara

1. **Wawancara bersama Ibu Novi ketua PKK gampong Matang teungoh**

2. **Wawancara bersama Ibu Hamiati kader PKK gampong Matang teungoh**

3. Wawancara bersama Ibu Nur baiti masyarakat gampong Matang teungoh

4. Wawancara bersama Ibu Zahriana Ketua PKK Kota Lhoksukon

5. Wawancara bersama Ibu Yusliani kader PKK Kota Lhoksukon

6. Wawancara bersama Ibu Weli Yani masyarakat Kota Lhoksukon

7. Wawancara bersama Ibu Ita hasti ketua PKK gampong Asan LB

8. Wawancara bersama Ibu Sanuati kader PKK gampong Asan LB

9. Wawancara bersama Ibu Aisyah masyarakat gampong Asan LB